



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT**

**RANCANGAN  
AKHIR  
RENCANA KERJA**

**2024**

**(RENJA)**

---

**DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN TANAH LAUT**

Jl. H. Boejasin No. 09 Pelaihari Telp. (0512) 2198

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 ini dapat diselesaikan dengan baik. Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut ini memuat kondisi umum, isu-isu strategis, sasaran pokok dan prioritas yang menjadi agenda pembangunan bidang kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut untuk Tahun Anggaran 2024.

Dengan adanya Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut ini, nantinya akan menjadi pedoman atau acuan untuk melaksanakan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan dibiayai baik melalui pendanaan yang bersumber dari APBD atau APBN maupun sumber pendanaan lainnya.

Pada akhirnya kami sangat menyadari bahwa Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut ini masih jauh dari sempurna, oleh sebab itu koreksi dan saran sangat kami harapkan dari seluruh komponen kesehatan maupun pihak-pihak yang terkait lainnya untuk perbaikan Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut di Tahun yang akan datang.

Akhirnya, kepada semua pihak yang telah menyumbangkan pikiran dan tenaganya dalam penyusunan Renja Dinas Kesehatan Tahun 2024 ini, kami mengucapkan terima kasih.

Pelaihari, Mei 2023

Kepala Dinas Kesehatan  
Kabupaten Tanah Laut,



dr. Hj. Isna Farida, M.Kes  
NIP. 19740612 200501 2 016

# DAFTAR ISI

Halaman

<b>KATA PENGANTAR</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI</b>	<b>ii</b>
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	<b>4</b>
A. Latar Belakang .....	4
B. Landasan Hukum .....	6
C. Maksud dan Tujuan .....	8
D. Sistematika Penulisan .....	9
<b>BAB II     EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU</b>	<b>15</b>
A. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD.....	15
B. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD .....	38
C. Isu-Isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD.....	46
D. Review Terhadap Rancangan Awal. ....	50
E. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat. ....	50
<b>BAB III    TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH</b>	<b>74</b>
A. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	74
B. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD .....	77
<b>BAB IV    RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH</b>	<b>80</b>
<b>BAB V     PENUTUP</b>	<b>122</b>
A. Catatan Penting.....	122
B. Kaidah Pelaksanaan.....	122
C. Rencana Tindak Lanjut	
<b>LAMPIRAN</b>	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pembangunan Kesehatan merupakan bagian dari pembangunan yang bertujuan meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan secara berkesinambungan serta dilakukan melalui proses perencanaan dan penganggaran yang terpadu dan terarah.

Pedoman yang digunakan dalam proses Perencanaan dan Penganggaran berdasarkan pada dokumen perencanaan strategis yang efektif dan efisien. Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun yang merupakan terjemahan dari perencanaan strategis tahunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Renja mempunyai kedudukan strategis dalam menjembatani perencanaan Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024 - 2026 dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renja

Perangkat Daerah disusun dengan tahapan:

- a. persiapan penyusunan;
- b. penyusunan rancangan awal;
- c. penyusunan rancangan
- d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
- e. perumusan rancangan akhir; dan
- f. penetapan

Renja Perangkat Daerah disusun berdasarkan kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD serta didasarkan pada evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Perangkat Daerah dan pada akhirnya Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Rencana Kerja (Renja) Dinas kesehatan untuk Tahun Anggaran 2024 ini adalah Dokumen Perencanaan Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 yang mana merupakan Tahun pertama pada Rencana Strategis yang mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 – 2026, Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Tahun 2024 memuat arah kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata, isu Strategis dan Aspirasi masyarakat yang tumbuh dan berkembang di kabupaten Tanah Laut yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan daerah dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun d

Dalam upaya mencapai target sasaran pembangunan yang telah diamanatkan di dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2005 – 2025, tentunya diperlukan Perencanaan yang matang, terpadu dan Terintegrasi agar proses pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditentukan dapat berjalan secara efektif, efisien dan tepat sasaran

## **1. 2. Landasan Hukum**

Landasan hukum penyusunan Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang - Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6537);

7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887):
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan mutu pelayanan dasar pada Standar Pelayanan pelayanan minimal Bidang Kesehatan;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1718);
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 - 2026;

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

#### **a. Maksud**

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 disusun dengan maksud untuk :

1. Sebagai pedoman bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya selama periode satu tahun 2024 dengan mengacu pada RKPD Kabupaten Tanah Laut dan berpedoman pada Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut
2. Memberikan Informasi kepada pemangku Kepentingan (Stakeholder) tentang rencana kerja tahun berjalan
3. Sinkronisasi dan Optimalisasi pencapaian target kinerja RPD Tahun 2024 sd 2026, khususnya untuk pencapaian target kinerja Tahun 2024
4. Akselerasi dalam pencapaian target standart pelayanan minimal yang telah ditetapkan kementrian



5. Menindaklanjuti kebijakan Nasional dan propinsi yang harus di alokasikan di daerah.

b. Tujuan

Tujuan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut adalah untuk :

1. Menetapkan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan prioritas pembangunan bidang Kesehatan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut untuk dilaksanakan pada Tahun 2024 sesuai dengan prioritas, Kondisi, potensi, Permasalahan, kebutuhan nyata, isu strategis dan aspirasi masyarakat yang tumbuh dan berkembang di Kabupaten Tanah Laut.
2. Mengoptimalkan peran dan fungsi Dinas Kesehatan didalam pelaksanaan Pembangunan daerah Kabupaten Tanah Laut dibidang Kesehatan untuk mencapai target Kinerja Tahun 2024
3. Mempermudah pengendalian, Monitoring, evaluasi dan Koordinasi pelaksanaan rencana Kegiatan Kurun waktu di Tahun 2024

#### **1. 4. Sistematika Penulisan**

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

### **BAB I. PENDAHULUAN**

Menguraikan gambaran umum penyusunan rancangan Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut, agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

#### **1.1. Latar Belakang**

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut, proses penyusunan Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut, keterkaitan antara Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut dengan dokumen RKPD, Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

## **1.2. Landasan Hukum**

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran

## **1.3. Maksud dan Tujuan**

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut.

## **1.4. Sistematika Penulisan**

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut, serta susunan garis besar isi dokumen.

## **BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022**

Bab ini menggambarkan kajian (review) memuat hasil evaluasi pelaksanaan rencana kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut tahun 2022 . Evaluasi menjelaskan tentang capaian target kinerja keluaran kegiatan dan realisasi target capaian kinerja terhadap Renstra.

### **2.1. Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu dan capaian Renstra Perangkat Daerah**

Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut tahun-tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut tahun lalu, dan realisasi Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut dan/atau realisasi APBD untuk Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut yang bersangkutan. Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;

## **2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD**

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan. Jika Perangkat Daerah yang bersangkutan belum mempunyai tolok ukur dan indikator kinerja yang akan diuji, maka setiap Perangkat Daerah perlu terlebih dahulu menjelaskan apa dan bagaimana cara menentukan tolok ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan masing-masing sesuai tugas pokok dan fungsi, serta norma dan standar pelayanan Perangkat Daerah yang bersangkutan. Pada pembahasan sub bab ini perlu disajikan tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah, yang disesuaikan menurut Perangkat Daerah masing-masing, dengan format Tabel T-C.30.

## **2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD**

Berisikan uraian mengenai :

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah;
2. Khusus provinsi, uraikan mengenai koordinasi dan sinergi program antara Perangkat Daerah provinsi dengan Perangkat Daerah kabupaten/kota serta dengan kementerian dan lembaga di tingkat pusat dalam rangka pencapaian kinerja pembangunan;
3. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
4. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (Sustainable Development Goals);
5. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah; dan
6. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

## **2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi - asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota (bila sudah dilakukan).

## **BAB III. TUJUAN DAN SASARAN DINAS KESEHATAN**

### **3.1. Telaah terhadap Kebijakan Nasional**

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

### **3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Kesehatan**

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

## **BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KESEHATAN**

### **4.1. Program dan Kegiatan**

Berisikan penjelasan mengenai:

- a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan atas :
  1. Pencapaian visi dan misi kepala daerah,
  2. Pencapaian SDGs,
  3. Pengentasan kemiskinan,
  4. Pencapaian NSPK dan SPM,
  5. Pendayagunaan potensi ekonomi daerah,
  6. Program Prioritas Nasional / Provinsi,
  7. Program Strategis Nasional,

8. Peningkatan Pendapatan Daerah,
- b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi:
  1. Jumlah program dan jumlah kegiatan.
  2. Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu).
  3. Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.
- c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.
- d. Tabel rencana program dan kegiatan

## **BAB V. PENUTUP**

Berisikan uraian penutup, berupa:

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
- c. Rencana tindak lanjut.

Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama Perangkat Daerah dan nama dan tanda tangan kepala Perangkat Daerah, serta cap pemerintah daerah yang bersangkutan.

## BAB II

### HASIL EVALUASI RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN 2022

Pelaksanaan evaluasi sebagai salah satu fungsi peningkatan kualitas kinerja instansi pemerintah, dilaksanakan guna mengetahui program / kegiatan dan sub kegiatan yang tidak memenuhi target, telah memenuhi target ataupun melebihi target kinerja yang direncanakan, sehingga atas dasar evaluasi pelaksanaan tersebut dapat diketahui:

1. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program / kegiatan dan sub kegiatan;
2. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
3. Kebijakan / tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Evaluasi Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut didasarkan dan merujuk pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tahun 2018 - 2023, Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut 2018 - 2023.

#### **2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Kesehatan**

Visi Kabupaten Tanah Laut sebagaimana tertuang dalam RPJMD Tahun 2018-2023 adalah "MEWUJUDKAN TANAH LAUT YANG BERINTERAKSI" (BERkarya, Inovasi, Tertata,Religius,Aktual dan Sinergi) dengan Misi sebagai berikut :

- 1. Berkarya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan masyarakat yang berbasis teknologi untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya;**
2. Menciptakan inovasi di segala sendi kehidupan masyarakat dan pengembangan industri kreatif;
3. Membangun tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*);
4. Meningkatkan kuantitas dan kualitas religiusitas dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dan kehidupan masyarakat;
5. Membangun sinergitas yang baik antar tingkat pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut sebagai salah satu OPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam menyelenggarakan urusan wajib pemerintah daerah bidang Kesehatan wajib berperan untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut dengan menjadi institusi yang responsive, Kreatif dan Inovatif dalam upaya menjawab berbagai perubahan dan tantangan yang berhubungan dengan permasalahan Kesehatan dengan mengajak peran serta masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pemecahan masalah bidang Kesehatan

Dalam rangka meningkatkan target dan realisasi Kinerja program dan kegiatan serta untuk menganalisis perencanaan kebutuhan pada tahun 2024, evaluasi Rencana Kerja dengan cara melakukan perbandingan atau membuat sandingan data antara target capaian Renstra sesuai atau sampai dengan periode akhir Renstra, oleh karena itu diperlukan analisis yang tepat untuk mengetahui dan mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dari lingkungan Internal maupun eksternal Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut sehingga dapat ditemukan penerapan strategi yang tepat berkaitan dengan Misi Kepala Daerah, maka Dinas Kesehatan memiliki keterkaitan dalam menjalankan Misi ke 1 (satu) yaitu Berkarya meningkatkan kualitas SDM dan pelayanan masyarakat yang berbasis teknologi untuk meningkatkan Pembangunan ekonomi, Sosial dan Budaya.

Tujuan yang ingin dicapai dalam upaya mewujudkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018 – 2023 adalah :

#### **I. Meningkatkan Status Kesehatan Masyarakat**

Dengan Sasaran :

1. Meningkatnya Keselamatan Ibu Melahirkan dan anak serta Gizi Masyarakat  
Dengan Indikator sasaran :
  - a. Persentase Ibu Hamil yang dilayani sesuai standar
  - b. Persentase Ibu bersalin yang sesuai standart
  - c. Persentase Bayi Baru lahir yang sesuai standar
  - d. Persentase Balita yang mendapat Pelayanan gizi sesuai standar
2. Meningkatnya Promosi kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
  - a. Persentase Rumah Tangga berPHBS
  - b. Persentase Desa yang melaksanakan Gerakan Masyarakat sehat
3. Meningkatkan Kesehatan Lingkungan
  - a. Persentase desa STBM



- b. Persentase TTU yang memenuhi syarat kesehatan
- 4. Meningkatnya Kesehatan Kerja dan Olah raga
  - a. Persentase puskesmas yang melaksanakan pelayanan Kesehatan Kerja dan olah raga
- 5. Meningkatnya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
  - a. Persentase orang dengan Penyakit Tidak Menular yang sesuai standar
  - b. Persentase Desa bebas KLB Penyakit Menular
  - c. Persentase Desa Universal Child Immunization

## **II. Meningkatkan Mutu Pelayanan Kesehatan**

Dengan Sasaran :

- 1. Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan
  - a. Persentase fasilitasi kesehatan yang terakreditasi Utama
  - b. Persentase pelayanan kegawatdaruratan oleh Publik Service Center
  - c. Persentase Kesehatan yang berstatus BLUD
  - d. Persentase Desa dengan IKS Kategori Sehat
  - e. Persentase jumlah kelompok Asuhan Mandiri Tanam Obat Keluarga (Asman Toga) di desa
  - f. Persentase penduduk miskin yang menjadi peserta JKN
- 2. Meningkatkan Fasilitasi Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Manusia Kesehatan, dengan Sasaran
  - a. Persentase fasilitasi pelayanan Kesehatan yang sesuai standar
  - b. Persentase Puskesmas dengan alat Kesehatan yang standar
  - c. Persentase obat dan BMHP yang sesuai formularium Nasional
  - d. Persentase tenaga Kesehatan yang memiliki Kompetensi sesuai dengan standar

Program yang dilaksanakan untuk mendukung tercapainya sasaran Rencana Strategis direalisasikan dalam 3 (tiga) program 11 (sebelas) Kegiatan dan 53 (lima puluh tiga) Sub Kegiatan, dalam rangka meningkatkan target dan realisasi kinerja program dan kegiatan serta untuk menganalisis perencanaan Tahun 2024 maka dibutuhkan evaluasi rencana Kerja dengan cara melakukan perbandingan data antara target dan realisasi kinerja hasil program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun sebelumnya.

Hasil evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022

**Tabel 2.1**  
**Evaluasi,Tujuan, Sasaran,Program Tahun 2022**

Tujuan/ Sasaran/Program			Indikator	Satuan	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Meningkatkan status Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya Pelayanan Ibu melahirkan dan anak serta gizi Masyarakat	Pemenuhan Upaya Kesehatan perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Ibu Hamil yang dilayani sesuai standar	%	95%	81,5 %	85,8%	
			Persentase ibu bersalin yang dilayani sesuai Standar	%	95%	91,2%	96%	
			Persentase Bayi Baru Lahir yang dilayani sesuai Standar	%	98%	95,6%	97,5%	
			Persentase Balita yang mendapat pelayanan gizi sesuai Standar	%	95%	84,7%	98,1%	
	Meningkatnya Promosi kesehatan dan pemberdayaan Masyarakat		Persentase Rumah Tangga berPHBS	%	50%	53%	106%	
			Persentase Desa yang melaksanakan Gerakan Masyarakat sehat	%	100%	100%	100%	

	Meningkatnya Kesehatan Lingkungan,		Persentase desa STBM	%	84,6%	100%	120%	
			Persentase TTU yang memenuhi syarat Kesehatan	%	80%	83%	105%	
			Persentase TPM yang memenuhi Syarat Kesehatan	%	70%	83%	119%	
	Meningkatnya Kesehatan Kerja dan Olah Raga		Persentase Puskesmas yang melaksanakan Pelayanan Kesehatan Olah Raga	%	100%	100%	100%	
	Meningkatnya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Pemenuhan Upaya Kesehatan perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase orang dengan penyakit Tidak Menular yang dilayani sesuai standar	%	100%	73,8%	73,8%	
			Persentase Desa bebas KLB Penyakit Menular	%	100%	100%	100%	
			Persentase Desa Universal Child Immunization (UCI)	%	100 %	89,5%	89,5%	
	<b>Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan</b>	Meningkatkan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Pemenuhan Upaya Kesehatan perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang sesuai Standar	%	75%	70%	93%

			Persentase Puskesmas dengan alat Kesehatan yang standar	%	100%	71%	71%	
			Persentase obat dan BMHP yang sesuai Formularium Nasional	%	92%	92%	100%	
	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	persentase tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi sesuai dengan standar	%	100%	90%	90%	
	Meningkatkan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Pemenuhan Upaya Kesehatan perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase fasilitas Kesehatan yang terakreditasi Utama	%	58%	0%	0%	
			Persentase Pelayanan kegawat daruratan oleh Public Service Center (PSC)	%	100%	100%	100%	
			Persentase Fasilitas Kesehatan yang berstatus BLUD	%	100%	100%	100%	

	Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan Primer dan Tradisional	Pemenuhan Upaya Kesehatan perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Desa dengan IKS katagori Sehat	%	40%	0%	0%	
			Persentase Jumlah Kelompok Asuhan Mandiri Tanan Obat Keluarga (Asman TOGA) di Desa.	%	52%	100%	192%	
	Meningkatkan Mutu Pelayanan Pembiayaan Kesehatan		Persentase penduduk miskin yang menjadi peserta JKN	%	100%	99,62%	90,23%	

**Tabel T-C 29**  
**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan**  
**Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022**  
**Kabupaten Tanah Laut**

No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu ( n-2)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun berjalan	
					Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (TW 1) 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar									
I	Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	IKM	88,30	81%	85,9%	88.31%	104%	87%	-	

1.	Perencanaan, Peranggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tersusun	100%	100%	100%	96,10%	96%	100%	57,14%	0,74%
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah tersusun	7 Dok	100%	4 Dok	4 Dok	100%	7 Dok	4 Dok	57,14
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	25%	100%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pembayaran Gaji, Tunjangan, Jaminan Kesehatan ASN	12 Lap	100%	12 bln	12 bln	100%	12 bln	3 bln	25%
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan SKPD yang tersusun sesuai dengan ketentuan	1 Dok	100%	24 Dok	24 Dok	100%	1 Dok	-	0%
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	90%	100%	100%	76,98%	76,98%	100%	0%	0%

	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	65 Org	85%	63 Org	46 Org	73,02%	277 Org	-	-
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	60 Org	82%	63 Org	51 Org	80,95%	-	-	-
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	80%	82,19%	100%	95,71%	95,71%	100%	46,19%	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	5 Paket	100%	1 unit	1 unit	100%	5 Unit	2 Unit	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	13 Paket	98%	8 Jenis	8 Jenis	100%	12 paket	10 Paket	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1 Paket	95%	3 Jenis	3 Jenis	100%	14 Paket	9 Paket	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5 Paket	93%	10 Jenis	9 Jenis	90%	3 Paket	1 Paket	



	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	5 Paket	100%	11 Paket	10 Paket	90,91%	-	-	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	14 laporan	86,13%	30 kali	28 kali	90,33%	12 Lap	3 lap	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	80%	81,95%	100%	100%	100%	100%	0%	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	5 Unit	81,95%	7 unit	7 unit	100%	2 Unit	-	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	81,95%	100%	100%	100%	100%	25%	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik	15 paket	100%	4 jenis	4 Jenis	100%	3 Lap	3 lap	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pembayaran Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	81,95%	4 bulan	4 bulan	100%	11 Lap	3 Lap	

	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	90%	96,80%	100%	90%	90%	100%	40%	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan terpelihara	25 Paket	96,80%	2 unit	1 Unit	90%	20 Unit	8 unit	
	<b>Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat</b>	<b>IKM</b>	81,3%	81%	100%			80	-	
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Fasilitas Pelayanan untuk UKM dan UKP Dinas Kesehatan	80%	84,42%	100%	76,73	76%	100%	0%	
	Pengembangan Puskesmas	Jumlah Pengembangan Puskesmas	3 Unit	98,47%	1 Jenis	1 Jenis	100%	3 Unit	-	

	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Jenis Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	2 Unit	95,61%	9 Jenis	9 Jenis	100%	28 Unit	-	
	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Jenis Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1 Unit	61,50%	82 Jenis	73 Jenis	89,02%	450 Unit	-	
	Pengadaan Obat, Vaksin	jumlah jenis Pengadaan Obat, Vaksin	3 Paket	69,42%	244 Jenis	213 Jenis	87,30%	1 Paket	-	
	Pengadaan Bahan Habis Pakai	jumlah jenis Pengadaan Bahan Habis Pakai	1 Paket	64,23%	77 Jenis	77 Jenis	100%	3 Paket	-	
	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	persentase Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	0	39,22%	100%	47%	47%	100%	-	

	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100%	86,48%	100%	85,06%	85%	100%	26,54%	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	6833 Org	89,88%	6825 Org	5559 Org	81,45%	6833 Org	1498	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	6523 Org	32,50%	6500 Org	5939 Org	91,37%	6523 Org	1368	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	6212 Org	59,46%	6100 Org	3846 Org	63,05%	6212 Org	1307 org	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	24991 Org	77,95%	30910 Org	29013	93,86%	25168 Org	6287 Org	

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan (UKS) sesuai standar	47227 Org	54,77%	58884 Org	46843 Org	79,55%	47227 Org	5525 Org	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	224677 Org	17,27	218115 Org	77688 Org	35,62%	224677 Org	32902 Org	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	39806 Org	33,25%	28700 Org	20912 Org	72,86%	23446 Org	8664 Org	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	26211 Org	28,46%	22619 Org	12105 Org	53,52%	26211 Org	7041 Org	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4019 Org	93,11%	4027 Org	3402 Org	84,48%	3503 Org	2452 Org	

	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	500 Org	22,88%	492 Org	437 Org	88,82%	498 Org	304 Org	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	5410 Org	58,39%	5699 Org	1323 Org	23,21%	6771 Org	352 Org	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	7370 Org	0,00%	7426 Org	2604 Org	35,07%	8263 Org	1611 Org	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah lokasi posko pelayanan kesehatan tanggap bencana bagi masyarakat	21 Dok	12,07%	20 Lokasi	-	-	22 Dok	-	

	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	21 Dok	41,20%	1040 Dok	674 Dok	64,81%	26 Dok	-	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan kesehatan Kerja dan Olah raga	21 Dok	78,05%	600 Org	139 Org	23,17%	3 Dok	-	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dok	85,58%	100%	81%	81%	1 Dok	-	
	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi Kesehatan	21 Dok	96,58%	13 Dok	9 Dok	69,23%	2 Dok	-	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dok Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	21 Dok	83,62%	100%	11%	11%	1 Dok	-	
	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	1 Dok	57,15%	1420 Org	29 Org	2,04%	1 Dok	-	

	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	persentase Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 Dok	98,12%	100%	99%	99%	19 Dok	-	
		Jumlah pelayanan gratis pasien kelas III (Jamkesda)			20 Jiwa	15 Jiwa	75,00%	-	-	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat			3 Dok	3 Dok	100%	1 Dok	-	
	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	1 Unit	86,17%	3 Unit	3 Unit	100%	1 Unit	-	



	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah pengujian laboratorium kesehatan yang dilaksanakan	1 Dok	87%	600 Sampel	35%	5,83%	3 Dok		
	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Puskesmas yang diberikan layanan akreditasi utama	11 Unit	38,45%	8 Puskesmas	0	0%	44 Dok		
	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1 Dok	22,88%	50 Lap	28 Lap	56,00%	1 Lap		
	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	1 Dok	11,10%	30 Dok	17 Dok	56,67%	1 Dok		
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Laporan keluarga yang sudah dikunjungi dan diintervensi masalah kesehatan ya oleh tenaga kesehatan Puskesmas	21 Dok	55%	69019	-	-	-	-	

	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	85%	59,53%	100%	92,05%	92%	100%	0%	
	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Muta (INM)	21 Unit	59,68%	44 Izin	37 Izin	84,09%	22 Puskesmas	-	
	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	1 Dok	67,68%	5 Dok	5 Dok	100%	1 Dok	-	

**Sumber Data : aplikasi E Money Tanah Laut (Capaian Renstra Akhir, proses rekon data masih berjalan pada system)**

Dari data sebagaimana tersebut diatas dapat dilihat bahwa Dinas Kesehatan beserta UPT Tahun 2022 realisasi serapan anggaran tergolong baik Namun ada Beberapa Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan yang tidak tercapai :

1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota yakni Sub Kegiatan Pemeliharaan rutin dan Berkala alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan dari Target Kinerja 100% namun hanya terealisasi 47,00% dikarenakan Kemampuan penyedia untuk melakukan Kalibrasi sehingga terdampak pada target Serapan keuangan dan Target Fisik tidak terserap;
2. Pada Kegiatan Penyediaan Layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dengan Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Terbatasnya logistik alokasi test HIV dari Dinkes Prov, Skrining terhadap terduga HIV di populasi kunci faktor risiko, dilaksanakan diakhir tahun bekerja sama dengan BNNK dan Satpol PP, sehingga tidak bisa diklaimkan strategi yang dilakukan yakni Mengusulkan logistik test HIV tahun 2024, dan pelaksanaan skrining diawal dan pertengahan tahun;
3. Pada Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat dengan target 1040 Orang dengan Realisasi 674 orang dengan Capaian 64,81% Target 1040 bumil adalah diambil dari jumlah ibu hamil kurang energi kronik (KEK) tahun 2021 dan menjadi target proyeksi ibu hamil (KEK) tahun 2022, realisasi kinerja 2022 adalah 674 ibu hamil KEK jadi dapat disimpulkan ibu hamil KEK tahun 2022 mengalami penurunan, tindak Lanjut yang akan dilakukan Sehubungan telah adanya penurunan ibu hamil KEK di Tahun 2022 akan tetap mempertahankan dan meningkatkan kinerja di Tahun 2023
4. Pada Sub Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga hanya terealisasi 32,56% dikarenakan Anggaran untuk pemeriksaan kebugaran haji dan warga masyarakat dari target 600 orang sedangkan realisasi CJH 139 orang dan warga masyarakat 91 orang solusi yang akan dilaksanakan dengan erkoordinasi dengan Kemenag mengenai proyeksi CJH tahun

berikutnya;

5. Pada Sub Kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Belum optimalnya dalam melaksanakan bimtek ke Puskesmas, akibat masih terkendala dengan Pandemi Covid-19, Perubahan Juknis DAK Non Fisik tahun 2022 yang baru bisa dilaksanakan akhir tahun solusi yang akan dilakukan untuk Peningkatan Kinerja Mengotimalkan bimtek kepuskesmas dalam rangka penanggulangan penyakit menular dan tidak menular
6. Penyediaan alat telemedicine realisasi fisik 100 % sedangkan realisasi keuangan 82,97 % sedangkan target 19 fasyankes sebenarnya adalah 4 fasyankes dan telah direalisasikan 100 %
7. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan Kegiatan Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota pada Sub Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar dari Target 1246 Orang dengan Realisasi 600 Orang atau dengan Capaian 48,15 % di Karenakan Insentif nakes utk penanganan covid msh disisakan setelah perubahan,sekitar 4 bulan, dan gaji utk ptt mmg kuotanya lebih,krn persiapan utk pkm yg akan berubah jd puskes rawat inap namun tidak direalisasikan Oleh Puskesmas

**Beberapa Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan yang tercapai Sesuai dengan Rencana Kerja pada Tahun 2022 :**

1. Kegiatan Penyediaan pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tk. Daerah Kab/Kota untuk Sub: Pengelolaan Jaminan kesehatan masyarakat dikarenakan Persentase target UHC minimal 95 % sudah terpenuhi dan untuk efisiensi pembayaran Iuran PBI APBD dan subsidi Mandiri Kelas 3 dengan rencana Tindak lanjut Peningkatan Kinerja dengan Penambahan peserta jaminan kesehatan dari segmen Lain selain PBI APBD (Mandiri dan PBPJ).
2. Untuk Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Daerah Kabupaten/kota yang merupakan Program Unggulan yakni merupakan Kegiatan 12 ( dua belas) SPM, jika secara data/ Indikator riil Dinas Kesehatan telah mencapai Target yang telah ditetapkan.

**Beberapa Kegiatan yang tercapai melebihi marget dengan rencana kerja pada Tahun 2022 :**

1. Persentase Rumah tangga yang berPHBS. Pada tahun 2022 target 50% dan realisasi sebesar 53% dengan nilai capaian sebesar 106%. Ini berarti pada tahun 2022 capaiannya mengalami penurunan dibanding tahun 2021. Dimana realisasi pada tahun 2021 sebesar 45% dari target 49,78% dimana capaian kinerjanya sebesar 111%. Namun telah mencapai target jangka menengah tahun 2023 sebesar 60%.
2. Persentase Desa STBM. Pada tahun 2022 targetnya 84,6% dan realisasi sebesar 100% dengan nilai capaian sebesar 120%. Ini berarti pada tahun 2022 capaiannya mengalami peningkatan dibanding tahun 2021. Dimana realisasi pada tahun 2021 sebesar 69,67% dari target 69,2% dimana capaian kinerjanya sebesar 101%. Dan telah mencapai target jangka menengah tahun 2023 sebesar 100%. Adapun penyebab peningkatan ketercapaian tersebut dikarenakan terlalu rendahnya target rentra yang dibuat dan dukungan sumber dana yang berasal dari APBN yang menjadikan seluruh Puskesmas mendapat dana untuk pelaksanaan STBM.
3. Persentase TTU yang memenuhi syarat kesehatan. Pada tahun 2022 targetnya 80% dan realisasi sebesar 83% dengan nilai capaian sebesar 105%. Ini berarti pada tahun 2022 dan tahun 2021 tidak mengalami perubahan yang signifikan dan telah mencapai target jangka menengah tahun 2023 yaitu sebesar 80%.
4. Persentase TPM yang memenuhi syarakat kesehatan. Pada tahun 2022 targetnya 70% dan realisasi sebesar 83% dengan nilai capaian sebesar 119%. Ini berarti pada tahun 2022 mengalami peningkatan dari dan tahun 2021 yaitu dengan target 70% dengan realisasi 50,9% dengan capaian 73%. Namun hal ini belum mencapai target jangka menengah tahun 2023 yaitu sebesar 80%. Adapun peningkatan pada capaian indikator tersebut dikarenakan dukungan dana APBD yang cukup.

## **2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan**

Dengan adanya perkembangan dan dinamisasi serta globalisasi yang terjadi dengan sangat cepat di masyarakat mengakibatkan munculnya suatu pola baru dan kecenderungan yang meningkat pula pada kebutuhan dan tuntutan atas pelayanan kesehatan yang optimal dan berkualitas. Pemberian pelayanan kesehatan dasar yang dilaksanakan di puskesmas saat ini menghadapi tantangan yang sangat berat bukan saja dari sesama instansi kesehatan tetapi juga dari para praktisi dan para profesional yang bergerak di bidang kesehatan. Hal ini dikarenakan oleh semakin banyaknya bermunculan ide, gagasan, dan terobosan baru dalam dunia usaha pelayanan kesehatan untuk merespons tuntutan dan kebutuhan pasar dalam mencari bentuk produk pelayanan kesehatan yang berkualitas dan dapat bersaing bukan hanya dari sisi harga tetapi juga benefit yang diberikan.

Adapun Produk dan Layanan di bidang kesehatan adalah sebagai berikut :

### **1. Pelayanan Kesehatan Dasar:**

Pelayanan kesehatan dasar yang juga disebut basic health services terdiri dari beberapa jenis pelayanan kesehatan yang dianggap esensial (sangat penting) untuk menjaga kesehatan seseorang, keluarga dan masyarakat agar hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Terdapat dua ketentuan yang menetapkan jenis-jenis pelayanan dasar, yaitu Peraturan Menteri Kesehatan 43/2014 tentang Standar Pelayanan Minimum dan Peraturan Menteri Kesehatan 75/2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat. Jenis-jenis pelayanan kesehatan dasar tersebut memerlukan pelayanan promotif, preventif, skrining, kuratif, dan rehabilitatif yang harus diberikan secara komprehensif dan holistik baik kepada kelompok masyarakat maupun individu. Pelayanan kesehatan Dasar dilakukan di 22 Puskesmas tersebar di 11 Kecamatan, adapun jenis pelayanan kesehatan Dasar adalah sebagai berikut:

- a. Promosi Kesehatan
- b. Kesehatan Lingkungan
- c. Pencegahan dan pemberantasan Penyakit

- d. Kesehatan Keluarga dan reproduksi
- e. Perbaikan Gizi Masyarakat
- f. Penyembuhan Penyakit dan Pelayanan Kesehatan

## 2. Pelayanan Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan

Pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjutan adalah upaya pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat spesialisik atau subspesialisik yang meliputi rawat jalan tingkat lanjutan, rawat inap tingkat lanjutan, dan rawat inap di ruang perawatan khusus. Pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjutan dilakukan di Rumah Sakit Umum Daraeh H. Boedjasin.

Pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjutan terdiri atas:

- a. Pelayanan kesehatan tingkat kedua (spesialisik)
- b. Pelayanan kesehatan tingkat ketiga (subspesialisik)

Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut didasarkan pada kajian capaian kinerja pelayanan sesuai indikator kinerja yang disajikan pada tabel sebagai berikut :

Tabel T-C 30  
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan  
Kabupaten Tanah Laut

No	Uraian Indikator	Satuan	SPM	IKK	Target Renstra Perangkat daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian Pada Tahun				
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	Angka kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup	Nilai			15	14	13	11	10	45	123	267	51	-	63,3%	11%	50%	50%	49
2	Angka Kematian Bayi per 1.000 kelahiran hidup	Nilai			10	9,8	9,6	9,4	9,2	7,4	11	3,6	12,3	-	100%	89%	267%	105%	100%
3	Prevalensi Stunting	Persentase			24%	23%	22%	21%	20%	5%	11%	6,4%	5,40%		100%	216%	10%	11%	11%
4	Persentase ibu hamil yang dilayani sesuai standar	Persentase			80%	85%	90%	95%	100%	85%	80%	87%	81,5%	-	100%	94%	97%	85,8%	85,9%
5	Persentase ibu bersalin yang dilayani sesuai standar	Persentase			80%	85%	90%	95%	100%	98%	90%	96%	91,2%	-	100%	106%	107%	96%	98%
6	Persentase bayi baru lahir yang dilayani sesuai standar	Persentase			90%	92%	95%	98%	100%	97%	96%	101%	95,6%	-	100%	104%	106%	97,5%	97,7%
7	Persentase balita yang dilayani sesuai standar	Persentase			88%	90%	92%	95%	100%	78%	77%	100%	84,7%	-	89%	86%	109%	98,1%	98,5%
8	Persentase rumah tangga berPHBS	Persentase			40%	40%	45%	50%	60%	60%	45%	46%	53%	-	100%	113%	111%	106%	107%
9	Persentase desa yang melaksanakan gerakan masyarakat sehat	Persentase			100%	100%	100%	100%	100%	75%	27%	60%	100%	-	75%	27%	60%	100%	100%
10	Persentase desa STBM	Persentase			32,3%	36	36	36	100%	61%	71%	75%	100%		54%	132%	101%	120%	122%



11	Persentase TTU yang memenuhi syarat kesehatan	Persentase			80%	80%	80%	80%	80%	61%	61%	67,85%	83%		76%	76%	85%	105%	107%
12	Persentase TPM yang memenuhi syarat kesehatan	Persentase			70%	70%	70%	70%	70%	74%	81%	82%	83%		100%	116%	73%	119%	120%
13	Persentase Puskesmas yang melaksanakan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olah Raga	Persentase			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%	100%
14	Persentase orang dengan penyakit Tidak Menular yang dilayani sesuai standar	Persentase			100%	100%	100%	100%	100%	52%	57%	81,70%	73,8%		52%	57%	100%	73,8%	100%
15	Persentase Desa bebas KLB Penyakit Menular	Persentase			100%	100%	100%	100%	100%	96%	100%	100%	100%		96%	100%	70%	100%	100%
16	Persentase Desa Universal Child Immunization (UCI)	Persentase			100%	100%	100%	100%	100%	90%	80%	70%	70%		90%	80%	70%	70%	90%
17	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai			82	83	84	86	100	82	84	83,69	83,2		100%	101%	99%	100	100%
18	Indeks Keluarga Sehat	Nilai			0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,1	0,1	0,17	0,2		15%	16%	21%	22%	23%
19	Persentase fasilitas Kesehatan yang terakreditasi Utama	Persentase			21%	37%	47%	58%	68%	37%	0%	77%	0%		100%	0%	163%	0%	163%
20	Persentase Pelayanan kegawat daruratan oleh Public Service Center (PSC)	Persentase			0%	100%	100%	100%	100%	60%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%	100%
21	Persentase Fasilitas Kesehatan yang	Persentase			4,7%	19%	100%	100%	100%	24%	100%	100%	100%		100%	525%	100%	100%	100%

	berstatus BLUD																		
22	Persentase Desa dengan IKS katagori Sehat	Persentase			20%	25%	30%	40%	50%	0%	0%	0%	0%		0%	0%	0%	55%	60%
23	Persentase Jumlah Kelompok Asuhan Mandiri Tanaman Obat Keluarga (Asman TOGA) di Desa.	Persentase			41%	44%	48%	52%	56%	41%	52%	100%	100%		100%	117%	125	192%	192%
24	Persentase penduduk miskin yang menjadi peserta JKN	Persentase			38%	100%	100%	100%	100%	78%	100%	100%	100%		100%	100%	99%	100%	100%
25	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang sesuai Standar.	Persentase			60%	65%	65%	75%	80%	56%	100%	78%	70%		100%	154%	112%	80%	100%
26	Persentase Puskesmas dengan alat Kesehatan yang standar	Persentase			84%	89%	89%	100%	100%	90%	100%	100%	71%		100%	112%	96%	100%	100%
27	Persentase obat dan BMHP yang sesuai Formularium Nasional	Persentase			85%	87%	87%	92%	100%	90%	100%	90%	92%		100%	115%	100%	100%	100%
28	Persentase tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi sesuai dengan standar	Persentase			100%	100%	100%	100%	100%	56%	60%	95%	90%		56%	60%	95%	90%	100%
29	Persentase Pelayanan administrasi Perkantoran dengan baik dan sesuai aturan	Persentase			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%	100%
30	Persentase Sarana Prasarana	Persentase			100%	100%	100%	89%	100%	80%	100%	100%	89%		90%	100%	100%	100%	100%

	Perkantoran sesuai standar																		
31	Persentase Pelayanan Kepegawaian sesuai aturan	Persentase			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%	100%
32	Persentase Pencatatan dan Pelaporan Keuangan sesuai standar	Persentase			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%	100%
33	Persentase Pencatatan aset sesuai standar	Persentase			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%	100%
34	Nilai Laporan Akuntabilitas kinerja Pemerintah (LAKIP)	Nilai			70	71	72	73	74	74	71	81,57	81,30		80	81	82	83	83
35	Nilai Reformasi Birokrasi (RB)	Nilai			0	74	75		77	0	76	76,06			0%	80	85	85	90%

Realisasi Anggaran Belanja Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut pada Tahun Anggaran 2022 dari Anggaran Rp.450.924.989.684 terealisasi sebesar Rp. 383.130.003.822 (85%), yang terdiri dari beberapa sumber pembiayaan sebagai berikut :

SUMBER PEMBIAYAAN	UNIT	ANGGARAN	REALISASI	%
<b>APBD</b>		<b>399.892.367.939</b>	<b>344.277.471.142</b>	<b>86</b>
	DINAS KESEHATAN	204.032.905.212	180.943.735.012	89
	INSTALASI FARMASI KABUPATEN	238.865.736	180.819.227	76
	UPTD LABKESDA	212.551.830	107.727.250	51
	UPTD PUSKESMAS	30.390.903.983	22.857.444.087	75
	RSUD H. BOEJASIN	127.980.133.625	106.540.903.332	83
	RSUD KH. MANSYUR	37.037.007.553	33.646.842.234	91
<b>DAK FISIK</b>		<b>23.115.995.239</b>	<b>19.674.079.860</b>	<b>85</b>
	DINAS KESEHATAN	9.060.240.124	7.377.574.838	81
	RSUD H. BOEJASIN	7.385.591.115	6.288.996.407	85
	RSUD KH. MANSYUR	6.670.164.000	6.007.508.615	90
<b>DAK NON FISIK</b>		<b>18.588.033.469</b>	<b>11.159.112.003</b>	<b>60</b>
	DINAS KESEHATAN	2.751.971.196	971.498.514	35
	INSTALASI FARMASI KABUPATEN	146.218.000	142.257.115	97
	UPTD LABKESDA	253.800.000	109.576.115	43
	UPTD PUSKESMAS	15.436.044.273	9.935.780.259	64
<b>DTU</b>		<b>8.204.599.155</b>	<b>6.993.299.400</b>	<b>85</b>
	DINAS KESEHATAN	495.001.155	425.000.000	86
	RSUD H. BOEJASIN	1.388.198.000	286.961.400	21

	RSUD KH. MANSYUR	6.321.400.000	6.281.338.000	99
<b>DID</b>		<b>1.123.993.882</b>	<b>1.026.041.417</b>	<b>91</b>
	DINAS KESEHATAN	1.123.993.882	1.026.041.417	91
<b>TOTAL</b>		<b>450.924.989.684</b>	<b>383.130.003.822</b>	<b>85</b>

### **2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD**

Pada tahun 2024 isu penting yang masih diangkat menyakut kebijakan tentang pembangunan bidang kesehatan masih seputar penanganan Angka Kematian Bayi, Angka Kematian Ibu, Prevalensi Stunting, Persentase CDR Kasus TBC dan Persentase angka kesakitan penyakit tidak menular menjadi pokok perhatian khusus yang menjadi isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi dinas kesehatan untuk dapat mengendalikan dan menanggulangi permasalahan yang harus selalu diwaspadai.

Berdasarkan hal tersebut diatas dapat digambarkan 3 (tiga) isu strategis permasalahan adalah sebagai berikut :

#### **1. Angka Kematian Ibu, Angka Kematian Bayi dan Stunting**

Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian bayi (AKB) masih menjadi masalah di Kabupaten Tanah Laut. Peningkatan AKI di Kabupaten Tanah Laut disebabkan meningkatnya jumlah kehamilan risiko tinggi, masih rendahnya deteksi dini masyarakat serta kurang mampunya kecepatan dan ketepatan pengambilan keputusan rujukan kehamilan risiko tinggi. Demikian pula dengan AKB yang antara lain disebabkan asfiksia (sesak nafas saat lahir), bayi lahir dengan berat badan rendah (BBLR), infeksi neonatus, pneumonia, diare dan gizi buruk. Status gizi buruk bayi antara lain disebabkan belum tepatnya pola asuh khususnya pemberian ASI eksklusif. Upaya untuk menurunkan AKI dan AKB dengan pelayanan kesehatan ibu dan anak di puskesmas PONED dan Rumah Sakit PONEK, namun pelaksanaan pelayanan kesehatan masih belum optimal disebabkan karena belum terpenuhinya prasarana dan sarana, belum meratanya pendayagunaan tenaga kesehatan serta masih kurangnya kompetensi tenaga kesehatan. Sarana pelayanan kesehatan jika dibandingkan dengan jumlah penduduk masih belum proporsional, sehingga masih diperlukan optimalisasi pelayanan kesehatan di tingkat dasar dan rujukan yang sesuai dengan standar.

## **2. Angka Kesakitan dan Kematian penyakit menular dan tidak menular**

Angka Kesakitan dan Kematian penyakit menular dan tidak menular masih tinggi. Meningkatnya jumlah kasus penyakit menular TB disebabkan belum semua komponen pelaksana penemuan kasus di sarana pelayanan kesehatan mendapat pelatihan dan belum optimalnya ketersediaan prasarana dan sarana di Puskesmas dan Rumah Sakit., Penemuan infeksi HIV dan AIDS tiap tahun cenderung meningkat disebabkan upaya penemuan dan pencarian kasus yang semakin intensif melalui Mobile VCT, kasus Malaria masih tinggi dan masih terdapat Kabupaten yang belum eliminasi Malaria. Penyakit-penyakit menular/ infeksi masih menjadi masalah di masyarakat, di sisi lain angka kesakitan dan kematian beberapa penyakit tidak menular dan degeneratif seperti Diabetes mellitus (DM), kardiovaskuler, hipertensi dan kanker (keganasan) cenderung meningkat. Salah satu penanganan dalam pencegahan penyakit tidak menular dan degeneratif adalah menggerakkan masyarakat untuk hidup sehat (GERMAS) yang dalam pelaksanaannya melalui pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan diarahkan agar masyarakat berdaya untuk ikut aktif memelihara kesehatannya sendiri, melakukan upaya pro-aktif tidak menunggu sampai jatuh sakit, karena ketika sakit sebenarnya telah kehilangan nilai produktif. Upaya promotif dan preventif perlu ditingkatkan untuk mengendalikan angka kesakitan yang muncul dan mencegah hilangnya produktivitas serta menjadikan sehat sebagai fungsi produksi yang dapat memberi nilai tambah.

### **3. Pengembangan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Sumber Daya Kesehatan di Kabupaten Tanah Laut;**

Kabupaten Tanah Laut memiliki permasalahan terkait jumlah, kualitas maupun sebaran fasilitas pelayanan Kesehatan dan tenaga kesehatan. Peningkatan baik jumlah maupun kualitas akses dan mutu pelayanan Kesehatan sangat dibutuhkan melalui penambah jumlah fasilitas pelayanan kesehatan dan pemerataan sebaran tenaga Kesehatan. Jumlah Tenaga Kesehatan di Kabupaten Tanah Laut masih kurang di beberapa Kecamatan/Desa, jumlah tenaga kesehatan masih banyak yang kurang baik dari sisi jumlah maupun jenis. Dalam mewujudkan peningkatan akses dan pemerataan pelayanan Kesehatan, terdapat beberapa program prioritas diantaranya yang berkaitan langsung dengan pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan Kabupaten Tanah Laut yaitu melalui “Penyediaan SDM Kesehatan pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan Khususnya untuk wilayah Terpencil melalui program penungasan khusus”. Rencana implementasi pemenuhan tenaga tersebut perlu didukung oleh data keadaan dan kebutuhan tenaga kesehatan.

**Tantangan** dalam Peningkatan Pelayanan Perangkat Daerah yang teridentifikasi sebagai berikut :

1. Dukungan sektor lain terhadap bidang kesehatan belum maksimal karena masih ada anggapan bahwa urusan kesehatan merupakan tanggung jawab Dinas kesehatan saja. Jaringan kemitraan dengan berbagai pihak termasuk sector pemerintah dan dunia usaha dalam penanganan masalah kesehatan sudah dilakukan namun belum optimal. Kemitraan dengan berbagai unsur terkait, termasuk stakeholder belum tertata secara baik sesuai peran, fungsi dan tanggung jawab masing masing dalam pemberdayaan dibidang kesehatan.



2. Anggaran pembiayaan kesehatan, permasalahan nya adalah alokasi yang masih belum optimal dan pembiayaan untuk upaya promotif dan preventif perlu terus ditingkatkan
3. Kesadaran masyarakat terhadap jaminan pemeliharaan kesehatan belum tumbuh dengan baik, terlihat dari masih rendahnya kemandirian masyarakat untuk membiayai jaminan pemeliharaan kesehatannya (Peserta Mandiri JKN- KIS/Non PBI). Selain kesadaran masyarakat, masalah utama dalam pemenuhan jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat adalah pendataan/Basis data masyarakat miskin yang belum terpadu sehingga menyulitkan dalam pendaftaran/Pembiayaan masyarakat melalui penerima Bantuan Iuran (PBI) JKN- KIS.
4. Pola Hidup yang tidak sehat dapat mengakibatkan berbagai macam penyakit, antara lain : Sakit jantung, tekanan darah tinggi, kanker, stroke, diabetes dan lainnya yang kesemuanya disebabkan oleh 3 faktor resiko utama yaitu: merokok, kurang aktifitas fisik dan kurangnya makan makanan berserat. Sikap dan perilaku pada masyarakat khususnya populasi berisiko yang belum terbangunnya kesadaran untuk menolong dirinya sendiri dan bertanggung jawab pada anggota keluarga serta masyarakat dari resiko penularan IMS dan HIV.
5. Akses terhadap pelayanan kesehatan belum merata dan masih terbatasnya tenaga kesehatan,
6. Sistem Informasi kesehatan belum optimal menyebabkan kualitas data yang dimiliki masih rendah, hal ini dapat menyebabkan permasalahan dalam penyusunan program dan kebijakan.

**Peluang** merupakan kondisi eksternal yang mendukung dan di manfaatkan dalam pelaksanaan tugas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut. Adapun peluang yang didapat diidentifikasi adalah :

1. Penataan Kelembagaan perangkat Daerah seiring dengan diubahnya Peraturan Pemerintah tentang organisasi perangkat Daerah, sesuai kebutuhan, potensi dan karakteristik dan kemampuan baik anggaran maupun sumber daya aparatur (mengacu pada UU Nomor 23 Tahun

2014 tentang Pemerintahan Daerah)

2. Pertumbuhan Ekonomi dan IPM yang semakin meningkat.
3. Terdapat berbagai sumber alokasi anggaran dalam pelaksanaan Pembangunan Kesehatan (APBN ,APBD dan DBH)
4. Meningkatnya dukungan dari pihak – pihak yang berkomitmen terhadap pembangunan kesehatan dari *stakeholder*

#### **2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD.**

Usulan Pagu Rancangan awal Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 memuat program dan Kegiatan yang Prioritas akan dilaksanakan Tahun 2024, usulan pagu anggaran dalam rancangan awal tersebut dilakukan analisis kebutuhan namun jika ternyata Alokasi anggaran tersebut tidak mencukupi berdasarkan analisis maka dalam penetapan KUA & PPAS perlu adanya Penyesuaian Pagu dengan kebutuhan alokasi anggaran guna mendukung Kelancaran pelaksanaan Program dan Kegiatan sehingga pada rancangan Akhir akan terdapat perubahan/ Penyesuaian pagu pada Program dan Kegiatan antara lain perubahan target capaian Kinerja dan perubahan Nomenklatur dikarenakan Pemutakhiran pada SIPD

#### **2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Tujuan yang ingin dicapai oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut adalah Meningkatkan Layanan dan Aksesibilitas Kesehatan dengan Sasaran Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat. Rancangan awal RKPD merupakan hasil dari proses pelaksanaan perencanaan yang diamanatkan didalam undang undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara evaluasi Rancangan peraturan daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Jangka panjang pembangunan jangka panjang daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Proses penyusunan Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 didasarkan kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2023 dimana salah satu prioritas pembangunan di bidang kesehatan adalah meningkatkan umur harapan hidup, menurunkan AKI, menurunkan AKB, Prevalensi Stunting, Persentase CDR Kasus TBC dan Persentase angka kesakitan penyakit tidak menular akan tercapai.

Selain itu Dinas Kesehatan dalam menyusun rencana Kerja 2024 juga melihat dari usulan masyarakat, dari hasil musrenbang tingkat kecamatan dapat dilihat pada tabel

**T-C. 32**  
**Usulan Program dan Kegiatan/ Sub Kegiatan dan Pola Kegiatan**  
**Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut**  
**Tahun 2024**

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja/Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024			Catatan Penting
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Pola Kegiatan	
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Tala	Nilai Sakip Dinas Kesehatan	82 A (Baik)	132.893.117.652,-		
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Capaian Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	139.893.117,-	Kegiatan Perencanaan Anggaran dan Penyusunan Laporan	
	Sub Kegiatan :						
	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dok	99.992.254,-	- Penyusunan Perencanaan Dokumen (Renstra, Renja,RKA,DPA)	
	2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Lap	39.999.816,-	- Penyusunan Pelaporan Dokumen (LAKIP, E Monev)	
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	120.658.515.701,-	Pembayaran Hak Hak ASN Lingkup Dinas Kesehatan	
	3. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1069/org/ bln	120.608.518.013,-	Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN Lingkup Dinas Kesehatan	

	4.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	3 Dok	49.997.688	Penyusunan Dokumen Laporan Keuangan	
3.		<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase capaian Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>29.995.563,-</b>	<b>Penatausahaan Barang Milik Daerah pada Dinas Kesehatan</b>	
	5.	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	6 lap	29.995.563,-	Penyusunan Dokumen Laporan Barang Milik Daerah (Aset SKPD)	
4.		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Capaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>100</b>	<b>150.000.000,-</b>	<b>Kegiatan Penunjang Kepegawaian Lingkup Dinas Kesehatan</b>	
	6.	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0	-	Pengadaan Pakaian Dinas ASN Dinas Kesehatan	
	7.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	25 Org	150.000.000,-	Kontribusi Pelatihan Teknis / Fungsional PNS Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	
	8.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	300 Org	-	Kontribusi Pelatihan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	
5.		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>85%</b>	<b>767.016.454</b>	<b>Kegiatan Umum Penunjang</b>	

9.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket, Komponen instalasi listrik yang disediakan	6 paket	39.982.274,-	Penyediaan Komponen Alat Listrik Lingkup Dinas Kesehatan	
10.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	79.954.647,-	Penyediaan ATK dan Bahan Komputer	
11.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 paket	49.979.798,-	Penyediaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	
12.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	74.976.600,-	Penyediaan Cetak dan Fotocopi Penunjang Kegiatan	
13.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dok	3.000.000,-	Belanja mass Media (Koran)	
14.	Penyediaan Bahan/Material		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	3 Paket	14.200.000,-	Kegiatan Penyelenggaraan Pameran dan Peringatan HKN	
15.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Lap	499.925.000,-	Penyediaan Anggaran Perjalanan Dinas Luar dan Dalam Daerah ASN Dinas Kesehatan	
16.	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	200 Dok	4.998.135,-	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	

6.	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		<b>Persentase Capaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>788.089.852,-</b>	<b>Pengadaan Mobil Operasional</b>	
	17. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	495.224.613,-	Belanja Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan (Mobil Dinas Jabatan)	
	18. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit	73.260.000,-	Belanja Kendaraan Dinas Bermotor Beroda Dua untuk Operasional atau Lapangan	
	19. Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	37 Unit	74.062.039,-	Penyediaan Alat Kantor dan Rumah Tangga	
	20. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	145.543.200,-	Belanja Modal Bangunan Rumah Genset 2 Unit	
7.	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Persentase Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>9.930.396.572,-</b>	<b>Kegiatan Penunjang Urusan Dinas Kesehatan</b>	
	21. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Lap	950.000.000,-	Penyediaan Jasa Pembayaran Air, Listik dan Internet	
	22. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Lap	8.980.396.572,-	Pembayaran Gaji PTT Nakes dan Non Nakes Lingkup Dinas Kesehatan	

8.	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Persentase Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>429.111.440,-</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah</b>	
	23. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	17 Unit	257.000.000,-	Belanja Pemeliharaan Mobil Dinas Operasional (BBM, Pajak, dan Service )	
	24. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	54 Unit	28.695.000,-	Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	
	25. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	2 Unit	143.416.440,-	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
II	<b>Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat</b>	<b>Kab. Tala</b>	<b>Persentase capaian SPM Bidang Kesehatan</b>	<b>100 %</b>	<b>107.666.740.729,-</b>		
			<b>Persentase Rumah sakit yang terakreditasi</b>	<b>100 %</b>			
			<b>Persentase FKTP Yang Terakreditasi (minimal Madya)</b>	<b>87%</b>			
9.	<b>Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>Persentase Pemenuhan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan</b>	<b>80%</b>	<b>39.627.983.626,-</b>	<b>Pemenuhan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan</b>	



	26.	Pembangunan Puskesmas		Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	2 Unit	11.539.560.000,-	- Relokasi 2 Puskesmas ( Kait kait dan Kintap) - Pembuatan Dokumen Kajian relokasi Puskesmas - Belanja Konsultan Perencanaan, Pengawas Kegiatan	
	27.	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya		Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	3 Unit	1.489.869.968,-	- Pembangunan Gedung bersalin Puskesmas Tambang Ulang, Pustu Panggung Baru, Poskesdes Kurau Utara	
	28.	Pengembangan Puskesmas		Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	2 Unit	1.123.459.194,-	Pengadaan Instalasi Air Kotor (IPAL)	
	29.	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya		Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang ditingkatkan sarana Prasarana, alat Kesehatan dan SDM agar sesuai standar	1107 Unit	10.159.577.320,-	- Paving Block Dinas Kesehatan,Puskesmas Bentok Kampung,Tirta Jaya, Kurau, Bumi Makmur, - Paving Block Pustu Batilai, Martadah	

30	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya		Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	21 Unit	4.102.500.149,-	- Rehab Poskesdes Pandahan, Karang Rejo, Benua Tengah, Tanjung Dewa, Bumi Harapan, Tanjung Dewa, Bumi Harapan, Nusa Indah, Batilai, Handil Suruk,Tampang, Batu Mulya, - Rehab Pustu Tambak Sarinah, Handil Babirik, Martadah Baru, Sumber Makmur - IPAL Puskesmas	
31.	Pengadaan Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan		Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	100 unit	5.549.990.961,-	Pengadaan Alat Penyimpanan Obat, Alat Kedokteran Umum, Gigi, Bedah dan Kebidanan	
32.	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi		Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center	100 Unit	273.445.000,-	Belanja Jasa Tenaga Ahli Penguji/ Kalibrasi Alat Kesehatan dan Sertifikasi Kalibrasi Alkes UPT dan Dinkes	
33.	Pemeliharaan rutin dan Berkala Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan		Jumlah Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang terpelihara Sesuai Standar	15 Unit	349.795.000,-	Kegiatan Belanja jasa Tenaga Ahli Pemeliharaan / Service Alat Kesehatan	

	34.	Pengadaan Obat Bahan Medis, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat Bahan Medis, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang Disediakan	2 Paket	4.999.993.034,-	Belanja Kertas SPMB, Obat-obatan lainnya, Belanja Bahan Pakai habis Kesehatan BMHP PKD	
	35.	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Vaksin Makanan dan Minuman Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman yang Didistribusikan ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	10 Paket	39.793.000,-	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman yang ke Puskesmas Lingkup Kabupaten Tanah Laut	
10.	<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>Persentase capaian Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>100%</b>	<b>67.270.650.684,-</b>	<b>SPM Dinas Kesehatan</b>	
	36.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	6851 Orang	2.299.993.709,-	Rakord teknis Program ibu Hamil dan Kunjungan bumil oleh Bidan dan SPOG dan Cetak KIA, pemberian PMT Bumil	
	37.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	6228 Orang	1.204.762.432,-	Rakord audit Komplikasi dan Pendampingan/ Kunjungan Ibu bersalin	

38.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir		Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	6228 Orang	197.635.000,-	Rakord Deteksi Dini risti bayi oleh bidan dan Dokter Spesialis	
39.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita		Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	30882 Orang	1.699.892.160,-	Pendataan dan DDTK (deteksi Dini tumbuh Kembang) Balita, Rakord dan Bimtek program pelayanan Kesehatan Balita dan PMT untuk balita BGM	
40.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	51000 Orang	469.775.550,-	Lomba Sekolah Sehat TK Kabupaten dan Provinsi dan cetak Raport Kesehatan	
41.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif		Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	222761 Orang	349.990.331,-	- Pemeriksaan Iva dan SADARI - Penyuluhan KTR (Kawasan Tanpa Rokok) untuk SMP, SMA/ sederajat - Rakord Pelayanan Terpadu Penyakit Tidak Menular (Pandu PTM)	
42.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut		Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	41831 Orang	350.000.000,-	- Cetak Buku Kesehatan Lanjut Usia dan Instrumen P3G (Pengkajian Paripurna Pasien Geriantri)	
43.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi		Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	109779 Orang	66.990.329,-	- Pemeriksaan Deteksi Dini Pengendalian Penyusun Penyakit Tidak Menular	

44.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus		Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4175 Orang	139.994.512,-	- Pengadaan Stik Humasens, Kolestrol, Stik Asam Urat - Review dan Evaluasi Program Pengendalian PTM, screening PTM	
45.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	498 Orang	79.993.072	- Peningkatan Kapasitas petugas Pengelola Program Kesehatan Jiwa, Keswa, dan Pendampingan ODGJ ke RSJ Sambang Lihum	
46.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	5694 Orang	254.999.948,-	- Kegiatan Hari TB Dunia Tingkat Kabupaten - Workshop Peningkatan Kapasitas program TBC bagi kader - Investigasi Kontak (IK) dari kasus Indeks TBC oleh Kader, LSM dan Masyarakat	
47.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV		Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	7926 Orang	99.973.134,-	- Screening HIV (RDT HIV ½ 3.0 25T) Monev Program HIV/AIDS Tingkat Kabupaten - Penyuluhan IMS, HIV/AIDS disekolah/ Ponpes	

48.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	1 Dok	174.560.000	Kegiatan Foting Fokus	
49.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	11 Dok	79.980.376,-	- Rakord Penanggulangan Krisis Kesehatan Akibat Bencana - Monev Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tanggap Bencana	
50.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	4 Dok	349.242.502,-	- Pencanaan Kegiatan Pemberian Tablet Tambah Darah (TTD) - Sosialisasi Kegiatan TTD Remantri dengan Aplikasi Ceria - Rakord Tekhnis evaluasi Kegiatan Program Gizi - Rakord Tekhnis Pencegahan dan Penanggulangan Balita Stunting	
51.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	2 Dok	19.994.300	Pemeriksaan Program Kebugaran Calon Jamaah Haji	
52.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	5 Dok	449.993.000,-	Pemeriksaan Sampel Makanan dan Air Minum	

	53.	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dok	49.970.000,-	Pertemuan Petugas Promkes Puskesmas	
	54.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	5 Dok	89.997.501,-	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rakord Pengembangan Asuhan Mandiri Kestrad melalui Pemanfaatan Toga dan Akunpresur Tingkat Kabupaten</li> <li>- Pembinaan dan Pengawasan Penyehat TK tradisional</li> <li>- Peningkatan Keterampilan petugas dalam Yankestrad Tk Kabupaten</li> </ul>	
	55.	Pengelolaan Surveilans Kesehatan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dok	449.992.854,-	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kegiatan Pekan Imunisasi Dunia (PID)</li> <li>- Pengelola/ Pemeriksaan Kesehatan Haji</li> <li>- Rakord review Surveilans PD3I</li> <li>- Peningkatan Petugas dalam penanggulangan Kasus Potensial KLB</li> </ul>	
	56.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA		Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	3064 Orang	414.996.168,-	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sosialisasi TPKJM</li> <li>- Pemeriksaan dan rehabilitasi Pecandu Narkoba</li> <li>- Pengadaan Stik Narkoba, Pot urine</li> </ul>	

57.	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dok	65.319.982,-	- Kegiatan Kusta Sedunia - Monev Program DBD Tk Kabupaten - Monev Program rabies, Ispa/Pneumonia Tk. Kabupaten	
58.	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	50 Dok	55.800.991.000,-	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi peserta PBPU dan BP Kelas 3 yang terdaftar	
59.	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	2 Dok	89.995.000,-	- Rakord KKS Tingkat Kecamatan - Deklarasi ODF - Pemantauan STBM	
60.	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 Dok	719.011.302,-	- Hibah Uang (PMI)	
61.	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota		Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	22 Unit	519.886.400,-	- Pendampingan Akreditasi Puskesmas - Self Assesment Akreditasi Puskesmas	
62.	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)		Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1 Lap	49.995.000,-	- Pertemuan dan Tindak Lanjut Penanggulangan KIPI Serius	
63.	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	1 Dok	249.995.000,-	- Monev SKDR dan Investigasi Kasus PD3I/ ORI - Imunisasi ke sekolah	



	64.	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	1 Unit	274.980.000,-	- Rakord PSC 119 Tala - Penyuluhan/ Pelatihan Penanganan Gawat Darurat - Kegiatan pelayanan kesehatan P3K/Posko Kesehatan/Tanggap Bencana/Bakti Sosial	
	65.	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	964 Orang	149.993.250,-	- Monitoring dan Evaluasi Pencatatan SITB Program P2 TBC - Mounthly Intern Cohort Analysis (MICA) TBC Drugs Resisten - pemeriksaan sputum basil tahan asam untuk follow up pengobatan TB SO	
	66.	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	15 Orang	33.466.890	- Konseling dan Pendampingan Terduga dan penderita HIV/AIDS	
	67.	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	80 Orang	24.289.982,-	- Peringatan Waspada Malaria (Hari Malaria Sedunia) - monev program malaria Tk Kabupaten - Pertemuan kader Pos Malaria Desa	
11.	<b>Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi</b>		<b>Persentase Akses point Sistem Informasi kesehatan yang digunakan</b>	<b>100%</b>	<b>538.214.516,-</b>	<b>Aplikasi Sistem Informasi Kesehatan</b>	

	68. Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1 Dok	538.214.516,-	- Belanja Upgrade Simpus Puskesmas - Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan Daerah Tk. Kabupaten dan Puskesmas	
12.	<b>Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>Persentase Fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah untuk 22 Puskesmas dan 3 RSUD yang terakreditasi minimal Utama</b>	<b>80%</b>	<b>229.891.903,-</b>	<b>Fasilitas Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kab. Tanah Laut</b>	
	69. Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan		Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	22 Unit	149.896.903,-	- Rakord Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan Tim Penyusun Laporan Survei Kepuasan Masyarakat - Penilaian Kinerja Puskesmas Tk. Provinsi	
	70. Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan		Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	1 Dok	79.995.000,-	- Rakord Pembinaan Pelayanan Kesehatan Rujukan - sosialisasi/diseminasi tentang Peraturan Klinik dan RS	
<b>III</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN</b>	<b>Kab. Tala</b>	<b>Persentase Puskesmas dengan 9 Jenis Tenaga Kesehatan Sesuai Standar</b>	<b>86%</b>	<b>513.649.023,-</b>		

13.	<b>Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota</b>		<b>Persentase Pemberian Izin Praktik Kesehatan diwilayah Kabupaten/ Kota</b>	<b>100%</b>	<b>15.251.890</b>	<b>Pemberian Izin Praktik Kesehatan wilayah Kabupaten Tanah Laut</b>	
	71. Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan		Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	22 Dok	15.251.890	Monitoring Evaluasi Perizinan Tenaga Kesehatan	
14.	<b>Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota</b>		<b>Persentase pemenuhan SDM kesehatan sesuai standar</b>	<b>90%</b>	<b>324.000.000,-</b>	<b>pemenuhan SDM kesehatan sesuai standar</b>	
	72. Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar		Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	15 Orang	324.000.000,-	Pembayaran Gaji Internship Dokter Umum/Dokter Gigi	
15.	<b>Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>Persentase Tenaga Kesehatan yang ber kompetensi</b>	<b>80%</b>	<b>174.397.133,-</b>	<b>Pengembangan Tenaga Kesehatan yang ber kompetensi</b>	
	73. Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	60 Orang	174.397.133,-	- Kegiatan Uji Kompetensi Tenaga Kesehatan - Seleksi Tenaga Kesehatan Teladan	

IV.	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Kab. Tala	Persentase apotik, Toko Obat, dan Optical yang memiliki Izin	100%	65.315.688,-		
			Persentase TPP (Tempat Pengolahan Pangan) yang memenuhi syarat sesuai standar	62%			
16.	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)		Persentase Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	100%	14.875.000,-		
74.	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)		Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	44 Dok	14.875.000,-	Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Alkes, Optikal dan Usaha Mikro Obat	
17.	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga		Persentase jumlah industri pangan yang telah memiliki ijin produksi oleh Industri Rumah Tangga	100%	24.965.000,-		

	75.	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	4 Dok	24.965.000,-	- Pelatihan PKP bagi Industri Rumah Tangga Pangan - pertemuan monitoring dan evaluasi pengawasan industri rumah tangga	
18.		<b>Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)</b>	<b>Persentase jumlah Industri Rumah tangga yang mempunyai Sertifikat Laik Higiene Sanitasi TPM</b>	100%	12.500.000		
	76	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	2 Dok	12.500.000	- pelatihan PKP bagi Depot Air Minum - Pelatihan Hygiene sanitasi makanan pada Jasa Boga	

19.	<b>Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga</b>		<b>Persentase jumlah IRT yang terdaftar dan telah dilakukan pemeriksaan untuk penerbitan ijin edar</b>	100%	12.975.688,-		
77.	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan		Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	1 unit	12.975.688,-	- Pengawasan Post Market terhadap Produk Pangan Industri Rumah Tangga	
IV	<b>Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan</b>		<b>Persentase Masyarakat yang melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat</b>	60%	229.728.000,-		
20.	<b>Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>Persentase Jenis penyediaan media promosi Kesehatan</b>	100%	99.918.000,-		
81.	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat		Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1 Dok	99.918.000,-	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan untuk Kegiatan promosi Kesehatan	
21.	<b>Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>Persentase Masyarakat yang melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat</b>	60%	69.930.000,-		

	82.	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	2 Dok	69.930.000,-	Lomba PHBS	
22.		<b>Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM</b>	100%	59.880.000,-		
	83.	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	4 Dok	59.880.000,-	- Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat - Lomba Posyandu	
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN</b>					<b>241.368.551.092</b>		

**T-C. 32.1**  
**Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2024**  
**Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut**

Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Pengusul		Usulan	Alamat Lokasi	Volume	Anggaran
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat						
Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota						
USULAN MUSRENBANG						1.690.000.000
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1.	H. Alpian Taurus	Rehab Poskesdes Pandahan	RT.01 RW.01 Desa pandahan Kec. Bati bati Kab. Tanah Laut	60 m2	180.000.000
	2.	Suparman	Rehab Poskesdes Nusa Indah	RT.8 Desa Nusa Indah Kec. Bati bati Kab. Tanah Laut	60 m2	175.000.000
	3.	Khalikul Basyir	Rehab Poskesdes Handil Suruk	Jalan Suka Damai RT. 003 Desa handil Suruk Kec. Bumi Makmur Tanah Laut	75 m2	650.000.000
	4	Mukhlis	Rehab Poskesdes Karang Rejo	RT. 15 Desa Karang Rejo Kec. Jorong Kab. Tanah Laut	105 m2	385.000.000



	5.	Sutarjo	Pustu Sumber Makmur	RT. 15/005 Desa Sumber Makmur Kec. Takisung Kab. Tanah Laut	33 m2	100.000.000
	6	Muhdi	Poskesdes Batilai	RT.03 Dusun 02 Desa Batilai Kec.Takisung Kab. Tanah Laut	48 m2	150.000.000
<b>Pengadaan Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan</b>	7	Yahya	Alat Kesehatan	Jalan Anai anai RT. 008/ RW. 004 Desa Bawah Layung Kab. Tanah Laut	1 Paket	50.000.000
<b>USULAN POKOK POKOK PIKIRAN DPRD KABUPATEN TANAH LAUT</b>						<b>195.000.000</b>
<b>Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya</b>	8	Achmad Sakuri	Upaya Kesehatan Masyarakat (Rehab Poskesdes Tampang)	RT.02 RW.01 Desa Tampang Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut	66 M2	195.000.000

### BAB III

## TUJUAN DAN SASARAN DINAS KESEHATAN

### 3. 1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan Nasional sebagaimana tertuang dalam rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2024 berdasarkan Agenda Pembangunan (Prioritas Nasional) pada RKP 2024 yang mana Dinas Kesehatan sebagai salah satu institusi penyedia layanan kesehatan rujukan termasuk dalam kebijakan nasional **Prioritas Nasional 3 yaitu SDM berkualitas dan berdaya saing**. Pada point C sebagai berikut:

Prioritas Nasional 3: Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing ;

- a. Mengendalikan pertumbuhan penduduk dan memperkuat tata kelola kependudukan
- b. Memperkuat pelaksanaan perlindungan sosial;
- c. *Meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta;***
- d. Meningkatkan pemerataan layanan pendidikan berkualitas;
- e. Meningkatkan kualitas anak, perempuan, dan pemuda;
- f. Mengentaskan kemiskinan;
- g. Meningkatkan produktivitas dan daya saing.

Telaah terhadap kebijakan nasional tersebut merupakan penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan. Dalam rancangan teknokratik RPJM dan Renstra Kementerian Kesehatan tahun 2020-2024 berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020- 2024 disusun sasaran strategis pembangunan kesehatan juga arah kebijakannya.

Sasaran strategis pembangunan kesehatan nasional adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatnya kesehatan ibu, anak dan gizi masyarakat;
- b. Meningkatnya ketersediaan dan mutu fasyankes dasar dan rujukan;

- c. Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit serta pengelolaankedaruratan kesehatan masyarakat;
- d. Meningkatnya akses Kemandirian dan Mutu Kefarmasian dan alat Kesehatan
- e. Meningkatnya pemenuhan SDM kesehatan dan kompetensi sesuai standar
- f. Terjaminnya pembiayaan kesehatan;
- g. Meningkatnya sinergisme pusat dan daerah serta meningkatnya tata kelolapemerintahan yang baik dan bersih;
- h. Meningkatnya efektivitas pengelolaan litbangkes dan sistem informasi kesehatan untuk pengambilan keputusan.

Arah kebijakan pembangunan kesehatan nasional tahun 2020 – 2024 diarahkan pada :

- 1) Penguatan pelayanan kesehatan primer dengan mengutamakan UKM tanpa meninggalkan UKP, serta mensinergikan FKTP pemerintah dan FKTP swasta.
- 2) Pelayanan kesehatan menggunakan pendekatan siklus hidup, mulai dari ibu hamil, bayi, anak balita, anak usia sekolah, remaja, usia produktif, dan lansia, dan intervensi secara kontinum (promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif) dengan penekanan pada promotif dan preventif.
- 3) Penguatan pencegahan faktor risiko, deteksi dini, dan aksi multisektoral (pembudayaan GERMAS), guna pencegahan dan pengendalian penyakit.
- 4) Penguatan sistem kesehatan di semua level pemerintahan menjadi responsif dan tangguh, guna mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dengan didukung inovasi teknologi.
- 5) Peningkatan sinergisme lintas sektor, pusat dan daerah, untuk menuju konvergensi dalam intervensi sasaran prioritas dan program prioritas termasuk integrasi lintas program.

Sejalan dengan Prioritas Nasional tersebut, Kabupaten Tanah Laut memiliki prioritas pembangunan ketiga yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 – 2026 hal tersebut ditetapkan melalui Sasaran yang harus dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut yaitu :

1. Mewujudkan Fasilitas pelayanan kesehatan yang berkualitas  
Menggerakkan pembangunan daerah berwawasan kesehatan.
2. Mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat.
3. Mewujudkan Peningkatan layanan kesehatan Masyarakat yang Berkualitas.
4. Mewujudkan kemandirian masyarakat di bidang kesehatan.

Yang dituangkan dalam Program, kegiatan dan Sub Kegiatan yang direncanakan pada tahun 2024 program tersebut merupakan penjabaran dari pelaksanaan Kewenangan Wajib dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan dan terkait isu Suitable Development Goals (SDGs). Dalam mengantisipasi tantangan ke depan menuju kondisi yang diinginkan Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut sebagai organisasi yang berada dalam jajaran Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dan perlu secara terus menerus mengembangkan kekuatan dan meminimalkan kelemahan dalam rangka menangkap peluang dan menghindari ancaman dengan membuat terobosan-terobosan baru. sehingga dapat meningkatkan kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil atau manfaat.

secara khusus pada tahun 2024 arah kebijakan Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut dalam upaya meningkatkan kualitas dan perluasan pelayanan kesehatan dalam menurunkan angka kematian ibu melahirkan (AKI), angka kematian bayi lahir (AKB), prevalensi stunting, Persentase CDR Kasus TBC dan Persentase angka kesakitan penyakit tidak menular. Dalam hal ini, Dinas Kesehatan harus terus berupaya meningkatkan mutu layanannya kepada masyarakat baik kuratif, rehabilitatif maupun promotif, preventif.

Penguatan Kesehatan di Kabupaten Tanah Laut pada Tahun Anggaran 2024 masih tetap difokuskan pada:

1. Penguatan Germas (Promotif dan Preventif) Air bersih, sanitasi, cuci tangan pakai sabun, olahraga, kesehatan lingkungan, kawasan sehat.
2. Penguatan health security: kemampuan untuk prevent, detect, response melalui Sistem peringatan dini (alert system), surveilans penyakit real time, kapasitas dan jejaring laboratorium, kapasitas SDM, protokol dan tata laksana respon cepat, litbang serta Perluasan case detection, skrining, karantina kesehatan. Penguatan sumber daya: fasilitas, farmasi, alkes, dan SDM Kesehatan melalui Pemenuhan fasilitas dan alkes sesuai kelas RS dan system rujukan, Pemenuhan dokter dan 9 jenis nakes di Puskesmas, Pemenuhan vaksin & obat (Pneumonia, TB, HIV/AIDS), Dukungan insentif bagi industri farmasi dan alkes dalam negeri dan Pengelolaan limbah medis.

### **3. 2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah**

Tujuan dan sasaran tersebut adalah perumusan sasaran yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan Rencana kerja (Renja) Tahunan yang sejalan dengan rencana strategis (Renstra) yang menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai, diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan secara operasional.

Untuk lebih jelasnya agar mengetahui Tujuan dan sasaran Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut pada Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.1  
Tujuan dan Sasaran Dinas Kesehatan

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Satuan	Target 2024
1	2	3	4	5	
I	Meningkatnya layanan dan aksesibilitas Kesehatan		Angka Harapan Hidup (AHH)	Nilai	70
1.1		Meningkatnya status kesehatan masyarakat	AKI per 100.000 Kelahiran Hidup	Angka	46
			AKB per 1000 kelahiran hidup	Angka	8
			Prevelensi Stunting	%	14%
II	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah		Nilai SAKIP KABUPATEN	Nilai	70,01 (BB)
2.1		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Dinas Kesehatan	Nilai	82

**Tujuan** yang akan dicapai oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut secara umum adalah terselenggaranya pembangunan kesehatan secara berhasil-guna dan berdaya-guna dalam rangka mencapai derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Tanah Laut yang setinggi-tingginya. Tujuan dan Sasaran Daerah pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024-2026 yang secara langsung berkaitan dengan urusan kesehatan, yaitu “**Meningkatnya Layanan dan Aksesibilitas Kesehatan**”. dengan Indikator Tujuan/ Sasaran “**Angka Harapan Hidup (AHH)**” dan “**Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah**” dengan Indikator Tujuan/ Sasaran “**Nilai Sakip Kabupaten**” Tujuan RPD tersebut didukung oleh tujuan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut yakni “**Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat dan Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kesehatan**”

**Sasaran** Daerah pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 – 2026 yang secara langsung berkaitan dengan urusan Kesehatan yaitu :

**1. Meningkatnya status kesehatan Masyarakat**

Indikator :

1. AKI per 100.000 Kelahiran Hidup
2. AKB per 1000 Kelahiran Hidup
3. Prevelensi Stunting

**2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Kesehatan**

Indikator :

1. Nilai SAKIP Dinas Kesehatan

## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KESEHATAN**

#### **TAHUN 2024**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi Undang-undang bahwa Untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang berakhir masa jabatannya tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan yang berakhir masa jabatannya pada tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diangkat penjabat Gubernur, penjabat Bupati, dan penjabat Walikota sampai dengan terpilihnya Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota melalui Pemilihan serentak nasional pada tahun 2024 kemudian selanjutnya Sebagaimana Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru. Kepala Daerah yang masa jabatannya berakhir Tahun 2023 untuk menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2024-2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026 serta memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah untuk menyusun Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026.

Berdasarkan latar belakang di atas serta mempedomani aturan-aturan tersebut, maka Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut melakukan penyusunan dokumen Rencana Strategis Tahun 2024-2026 dengan berpedoman kepada dokumen RPD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024-2026. Selanjutnya, RENSTRA Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut tahun 2024-2026 akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) setiap tahun selama periode tersebut. Usulan program dan kegiatan tersebut diharapkan dapat mendukung prioritas pembangunan



Kabupaten Tanah Laut serta diharapkan pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024.

Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan tahun 2024 sebanyak 5 (lima) program, 22 (dua puluh dua) kegiatan dan 83 (delapan Puluh tiga) sub kegiatan dengan Pagu Anggaran Rancangan Awal Rp. 279.088.482.696 sesuai pagu kesepakatan.

#### Rumusan Program usulan Rancangan Awal dengan RKPD Kabupaten Tanah Laut

Usulan Pagu Rancangan awal Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 memuat program dan Kegiatan yang Prioritas akan dilaksanakan Tahun 2024, usulan pagu anggaran dalam rancangan awal tersebut dilakukan analisis kebutuhan namun jika ternyata Alokasi anggaran tersebut tidak mencukupi berdasarkan analisis maka dalam penetapan KUA & PPAS perlu adanya Penyesuaian Pagu dengan kebutuhan alokasi anggaran guna mendukung Kelancaran pelaksanaan Program dan Kegiatan sehingga pada rancangan Akhir akan terdapat perubahan/Penyesuaian pagu pada Program dan Kegiatan antara lain perubahan target capaian Kinerja dan perubahan Nomenklatur dikarenakan Pemutakhiran pada SIPD

Adapun rencana Kerja dan Pendanaan yang dibutuhkan dalam pembangunan bidang kesehatan di Kabupaten Tanah Laut dapat dilihat pada tabel rencana program dan kegiatan sebagai mana terlampir. TC- 33

T-C. 33  
Program,Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Kesehatan Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025  
Kabupaten Tanah Laut

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja/Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Tala	Nilai Sakip Dinas Kesehatan	82 A (Baik)	132.893.117.652,-			83 A (Baik)	143.080.000.000
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Presentase Capaian Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	139.992.070,-			100%	330.000.000,00
Sub Kegiatan :									
	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dok	99.992.254,-	PAD		5 Dok	210.000.000
	2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Lap	39.999.816,-	PAD		5 Lap	120.000.000

2.	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		<b>Persentase Capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>120.658.515.701</b>			<b>100%</b>	<b>137.577.000.000</b>
	3. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1069 /org/ bln	120.608.518.013,	PAD		1170 Orang/ bulan	137.577.000.000
	4. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	3 Dok	49.997.688,-	PAD		2 Dok	77.000.000
3.	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>		<b>Persentase capaian Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>29.995.563,-</b>			<b>100%</b>	<b>60.500.000</b>
	5. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	6 lap	29.995.563,-	PAD		6 lap	60.500.000
4.	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>		<b>Persentase Capaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>100</b>	<b>150.000.000,-</b>			<b>100%</b>	<b>901.000.000</b>
	6. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	0	PAD		2 Paket	120.000.000

	7.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	25 Org	150.000.000,-	PAD		85 Org	510.000.000
	8.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	300 Org	0	PAD		300 Org	271.000.000
5.	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		<b>Persentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>85%</b>	<b>767.016.454,-</b>			<b>85%</b>	<b>929.000.000</b>
	9.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket, Komponen instalasi listrik yang disediakan	6 paket	39.982.274,-	PAD		6 paket	23.000.000
	10.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	79.954.647,-	PAD		3 Paket	53.000.000
	11.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 paket	49.979.798,-	PAD		2 paket	95.000.000
	12.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	74.976.600,-	PAD		2 Paket	80.000.000

	13.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dok	3.000.000,-	PAD		2 Dok	3.000.000
	14.	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	3 Paket	14.200.000,-	PAD		3 Paket	15.000.000
	15.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Lap	499.925.000,-	PAD		12 Lap	600.000.000
	16.	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	200 Dok	4.998.135,-	PAD		200 Dok	60.000.000
6.	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		<b>Persentase Capaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>788.089.852,-</b>			<b>100%</b>	
	17.	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	495.224.613,-	PAD		-	-
	18.	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit	73.260.000,-	PAD		-	-

	19. Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	37 Unit	74.062.039,-	PAD		30 Unit	90.000.000
	20. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	145.543.200,-	PAD		2 Unit	450.000.000
7.	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Persentase Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>9.930.396.572,-</b>			<b>100%</b>	<b>2.400.000.000</b>
	21. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Lap	950.000.000,-	PAD		12 Lap	500.000.000
	22. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Lap	8.980.396.572,-	PAD		12 Lap	1.900.000.000
8.	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Persentase Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>429.111.440,-</b>			<b>100%</b>	<b>342.500.000</b>

	23.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	17 Unit	257.000.000,-	PAD		17 Unit	234.000.000
	24.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	40 Unit	28.695.000,-	PAD		40 Unit	33.500.000
	25.	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	2 Unit	143.416.440,-	PAD		2 Unit	75.000.000
II	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat		Persentase capaian SPM Bidang Kesehatan	100 %	107.666.740.729,-			100 %	111.511.059.435
			Persentase Rumah sakit yang terakreditasi	100 %				100 %	
			Persentase FKTP Yang Terakreditasi (minimal Madya)	87%				100 %	

9.	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Pemenuhan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	80%	39.627.983.626,-			100 %	30.425.000.000
	26. Pembangunan Puskesmas		Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	2 Unit	11.539.560.000,-	PAD		2 Unit	6.500.000.000
	27. Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya		Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	3 Unit	1.489.869.968,-	PAD		4 Unit	1.750.000.000
	28. Pengembangan Puskesmas		Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	2 Unit	1.123.459.194,-	PAD		12 Unit	3.000.000.000
	29. Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya		Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	1107 Unit	10.159.577.320,-				
	30. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya		Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	21 Unit	4.102.500.149,-	PAD		15 Unit	2.750.000.000



31.	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan		Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	100 Unit	5.549.990.961,-			100 Unit	3.500.000.000
32.	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi		Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/ Regional Maintenance Center	100 Unit	273.445.000,-			100 Unit	300.000.000,-
33.	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan		Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	15 Unit	349.795.000,-	PAD		25 Unit	500.000.000
34.	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan		Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	2 Paket	4.999.993.034,-	PAD		2 Paket	2.800.000.000,-

	35.	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman yang Didistribusikan ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	10 Paket	39.793.000,-	PAD		10 Paket	25.000.000
10.		<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase capaian Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>100%</b>	<b>67.270.650.684,-</b>			<b>100%</b>	<b>80.673.781.115</b>
	36.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	6851 Orang	2.299.993.709,-	PAD		6851 Orang	8.600.000.000
	37.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	6539 Orang	1.204.762.432,-	PAD		6539 Orang	3.000.000.000
	38.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	6228 Orang	197.635.000,-	PAD		6228 Orang	375.000.000
	39.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	30882 Orang	1.699.892.160,-	PAD		30882 Orang	2.700.000.000

40.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	51.000 Orang	469.775.550,-	PAD		51.000 Orang	625.000.000
41.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif		Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	222761 Orang	349.990.331,-	PAD		224677 Orang	415.000.000
42.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut		Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	41831 Orang	350.000.000,-	PAD		41831 Orang	412.000.000
43.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi		Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	109779 Orang	66.990.329,-	PAD		22619 Orang	78.000.000
44.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus		Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4175 Orang	139.994.512,-	PAD		4027 Orang	160.000.000
45.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	498 Orang	79.993.072,-	PAD		492 Orang	90.000.000

46.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	5694 Orang	254.999.948,-	PAD		5694 Orang	400.410.000
47.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV		Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	7926 Orang	99.973.134	PAD		7926 Orang	125.000.000
48.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	1 Dok	174.560.000	PAD		1 Dok	200.000.000
49.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	11 Dok	79.980.376,-	PAD		11 Dok	89.278.560
50.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	4 Dok	349.242.502,-	PAD		4 Dok	512.000.000

51.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	2 Dok	19.994.300,-	PAD		2 Dok	50.000.000
52.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	5 Dok	449.993.000,-	PAD		6 Dok	712.000.000
53.	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dok	49.970.000,-	PAD		2 Dok	80.000.000
54.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	5 Dok	89.997.501,-	PAD		5 Dok	110.426.555
55.	Pengelolaan Surveilans Kesehatan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dok	449.992.854,-	PAD		1 Dok	500.000.000
56.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA		Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	3064 Orang	414.996.168,-	PAD		4638 Orang	465.066.000
57.	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dok	65.319.982,-	PAD		1 Dok	30.000.000

58.	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	50 Dok	55.800.991.000,-	PAD		1 Dok	58.500.000.000
59.	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	2 Dok	89.995.000,-	PAD		2 Dok	100.000.000
60.	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 Dok	719.011.302,-	PAD		2 Dok	939.600.000
61.	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota		Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	22 Unit	519.886.400,-	PAD		22 Unit	200.000.000
62.	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)		Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1 Lap	49.995.000,-	PAD		1 Lap	65.000.000
63.	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	1 Dok	249.995.000,-	PAD		1 Dok	300.000.000

	64.	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center(PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	1 Unit	274.980.000,-	PAD		1 Unit	550.000.000
	65.	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	964 Orang	149.993.250,-	PAD		964 Orang	200.000.000
	66.	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	15 Orang	33.466.890,-	PAD		15 Orang	60.000.000
	67.	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	80 Orang	24.289.982,-	PAD		80 Orang	30.000.000
11.	<b>Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi</b>		<b>Persentase Akses point Sistem Informasi kesehatan yang digunakan</b>	<b>100%</b>	<b>538.214.516,-</b>			<b>100%</b>	<b>64.399.880</b>
	68.	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1 Dok	538.214.516,-	PAD		1 Dok	64.399.880

12.	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah untuk 22 Puskesmas dan 3 RSUD yang terakreditasi minimal Utama	80%	229.891.903,-			80%	347.878.440
	69. Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan		Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	22 Unit	149.896.903,-	PAD		22 Unit	237.878.440
	70. Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan		Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	1 Dok	79.995.000,-	PAD		1 Dok	110.000.000
III	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN</b>	Kab. Tala	<b>Persentase Puskesmas dengan 9 Jenis Tenaga Kesehatan Sesuai Standar</b>	86%	513.649.023,-			90%	15.640.000.000
13.	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota		Persentase Pemberian Izin Praktik Kesehatan di wilayah Kabupaten/ Kota	100%	15.251.890			100%	40.000.000



	71. Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan		Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	22 Dok	15.251.890,-	PAD		22 Dok	40.000.000
14.	<b>Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota</b>		<b>Persentase pemenuhan SDM kesehatan sesuai standar</b>	90%	324.000.000,-			95%	15.000.000.000
	72. Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar		Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	15 Orang	324.000.000,-	PAD		500 Orang	15.000.000.000
15.	<b>Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>Persentase Tenaga Kesehatan yang ber kompetensi</b>	80%	174.397.133,-			90%	600.000.000
	73. Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	60 Orang	174.397.133,-	PAD		200 Orang	200 Orang

IV.	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Kab. Tala	Persentase apotik, Toko Obat, dan Optical yang memiliki Izin	100%	65.315.688,-			100%	139.000.000
			Persentase TPP (Tempat Pengolahan Pangan) yang memenuhi syarat sesuai standar	62%				68%	
16.	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)		Persentase Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	100%	14.875.000,-			100%	24.000.000
74.	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)		Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	44 Dok	14.875.000,-			44 Dok	24.000.000,-

17.	<b>Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga</b>		<b>Persentase jumlah industri pangan yang telah memiliki ijin produksi oleh Industri Rumah Tangga</b>	100%	24.965.000,-			100%	50.000.000
75.	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga		Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	4 Dok	24.965.000,-	PAD		4 Dok	50.000.000
18.	<b>Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)</b>		<b>Persentase jumlah Industri Rumah tangga yang mempunyai Sertifikat Laik Higiene Sanitasi TPM</b>	100%	12.500.000			100%	15.000.000

	76.	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	2 Dok	12.500.000	PAD		2 Dok	15.000.000
19.		<b>Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga</b>	<b>Persentase jumlah IRT yang terdaftar dan telah dilakukan pemeriksaan untuk penerbitan ijin edar</b>	<b>100%</b>	<b>12.975.688,-</b>			<b>100%</b>	<b>50.000.000</b>

	77.	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	1 unit	12.975.688,-	PAD		1 unit	50.000.000
IV	<b>Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan</b>		<b>Persentase Masyarakat yang melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat</b>	<b>60%</b>	<b>229.728.000,-</b>			<b>65%</b>	<b>415.000.000</b>
	20.	<b>Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Jenis penyediaan media promosi Kesehatan</b>	<b>100%</b>	<b>99.918.000,-</b>			<b>100%</b>	
	78.	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1 Dok	99.918.000,-	PAD		1 Dok	175.000.000
	21.	<b>Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Masyarakat yang melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat</b>	<b>60%</b>	<b>69.930.000,-</b>			<b>65%</b>	<b>125.000.000</b>

	79.	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	2 Dok	69.930.000,-	PAD			125.000.000
22.		<b>Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM</b>	<b>100%</b>	<b>59.880.000,-</b>			<b>100%</b>	<b>115.000.000</b>
	80.	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	4 Dok	59.880.000,-	PAD		4 Dok	115.000.000
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN</b>					<b>241.368.551.092</b>				

**T- C 34**  
**PAGU RANCANGAN AWAL DAN AKHIR PROGRAM/ KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN**  
**DINAS KESEHATAN TAHUN 2024**

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Pagu Rancangan Awal		Pagu Rancangan Akhir	
			Target	Kebutuhan Dana	Target	Kebutuhan Indikatif
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Sakip Dinas Kesehatan	82 A (Baik)	132.021.188.715	82 A (Baik)	139.893.117.652
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	299.999.613	100%	139.992.070
	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dok	199.999.921	6 Dok	99.992.254
	2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Lap	99.999.692	4 Lap	39.999.816
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	125.069.910.306	100%	120.658.515.701

	3.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1170/org/ bln	124.999.998.096	1069/org/ bln	120.608.518.013
	4.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2 Dok	69.912.210	3 Dok	49.997.688
3.	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>		<b>Persentase capaian Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>54.993.166</b>	<b>100%</b>	<b>29.995.563</b>
	5.	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	6 lap	54.993.166	6 lap	29.995.563
4.	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>		<b>Persentase Capaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>100</b>	<b>900.867.955</b>	<b>100%</b>	<b>150.000.000</b>
	6.	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	119.871.675	0	0
	7.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	85 Org	510.000.000	125 Orang	150.000.000
	8.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	300 Org	270.996.280	0	0



5.	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>85%</b>	<b>1.253.861.790</b>	<b>85%</b>	<b>767.016.454</b>
9.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket, Komponen instalasi listrik yang disediakan	6 paket	44.947.672	6 Paket	39.982.274
10.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	98.288.495	3 Paket	79.954.647
11.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 paket	146.914.719	2 paket	49.797.798
12.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	136.552.490	2 Paket	74.976.600
13.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dok	3.000.000	2 Dok	3.000.000
14.	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	3 Paket	14.200.000	3 Paket	14.200.000
15.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Lap	749.995.000	12 Lap	499.925.000

	16. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	200 Dok	59.963.414	200 Dok	4.998.135
<b>6.</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Capaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>848.489.952</b>	<b>100%</b>	<b>788.089.852</b>
	17. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	495.224.613	1 Unit	495.224.613
	18. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit	84.999.915	3 Unit	73.260.000
	19. Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	30 Unit	89.465.424	37 Unit	74.062,039
	20. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	178.800.000	2 Unit	145.543.200
<b>7.</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>3.144.263.093</b>	<b>100%</b>	<b>9.930.396.572</b>
	21. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Lap	950.000.000	12 Lap	950.000.000

	22. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Lap	2.194.263.093	12 Lap	8.980.396.572
8.	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>448.802.840</b>	<b>100%</b>	<b>429.111.440</b>
	23. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	17 Unit	257.000.000	17 Unit	257.000.000
	24. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	40 Unit	31.803.000	54 Unit	28.695.000
	25. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	2 Unit	159.999.840	2 Unit	143.416.440

II	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase capaian SPM Bidang Kesehatan	100 %	131.357.483.553	100 %	107.666.740.729
		Persentase Rumah sakit yang terakreditasi	100 %		100 %	
		Persentase FKTP Yang Terakreditasi (minimal Madya)	87%		87%	
9.	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	80%	53.177.428.160	80%	39.627.983.626
	26. Pembangunan Puskesmas	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	2 Unit	12.923.730.000	2 Unit	11.539.560.000
	27. Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	4 Unit	1.500.000.000	3 Unit	1.489.869.968
	28. Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	12 Unit	2.920.000.000	2 Unit	1.123.459.194
	29. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	15 Unit	2.653.372.240	23 Unit	4.102.500.149

30.	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Sarana di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	1540 Unit	16.780.868.736	956 Unit	8.891.162.636
31.	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	15 Unit	3.004.542.428	7 Unit	1.268.414.684
32.	Pengadaan Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	170 unit	6.499.961.114	100 Unit	5.549.990.961
33.	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center	350 Unit	319.991.660	100 Unit	273.445.000
34.	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah Obat dan Vaksinyang Disediakan	2 Paket	3.499.986.263	2 Paket	2.999.999.891
35.	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan	1 Paket	2.499.989.243	2 Paket	1.999.993.143
36.	Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dilakukan Pemeliharaan	1 Unit	24.988.400	0	0

	37.	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	25 Unit	499.998.326	15 Unit	349.795.000
	38.	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman yang Didistribusikan ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	10 Paket	49.999.750	10 Paket	39.793.000
10.	<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>Persentase capaian Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>100%</b>	<b>77.773.155.426</b>	<b>100 %</b>	<b>67.270.650.684</b>
	39.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	6851 Orang	7.594.273.500	6851 Orang	2.299.993.709
	40.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	6539 Orang	2.402.315.000	6539 Orang	1.204.762.432
	41.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	6228 Orang	254.130.000	6228 Orang	197.635.000

42.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	30882 Orang	2.065.533.680	30882 Orang	1.699.892.160
43.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	51.000 Orang	562.860.550	51.000 Orang	469.775.550
44.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	224677 Orang	398.053.710	222761 Orang	349.990.331
45.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	41831 Orang	367.998.000	41831 Orang	350.000.000
46.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	22619 Orang	67.994.437	109779 Orang	66.990.329
47.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4027 Orang	149.990.850	4175 Orang	139.994.512
48.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	492 Orang	79.993.925	498 Orang	79.993.072

49.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	5694 Orang	292.050.804	5694 Orang	254.999.948
50.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	7926 Orang	99.973.134	7926 Orang	99.973.134
51.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	1 Dok	174.560.000	1 Dok	174.560.000
52.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	11 Dok	88.035.376	11 Dok	79.980.376
53.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	4 Dok	455.127.878	4 Dok	349.242.502
54.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	2 Dok	19.994.300	2 Dok	19.994.300



55.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	6 Dok	649.987.658	5 Dok	449.993.000
56.	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	2 Dok	64.885.000	1 Dok	49.970.000
57.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	5 Dok	110.385.673	5 Dok	89.997.501
58.	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dok	449.998.431	1 Dok	449.992.852
59.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	4638 Orang	365.065.313	3064 Orang	414.996.854
60.	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dok	25.034.331	1 Dok	65.319.982
61.	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	50 Dok	57.499.998.000	50 Dok	55.800.991.000

62.	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	2 Dok	99.990.428	2 Dok	89.995.000
63.	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	2 Dok	1.164.500.000	1 Dok	719.011.302
64.	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	22 Unit	1.115.580.000	22 Unit	519.886.400
65.	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1 Lap	60.000.000	1 Lap	49.995.000
66.	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	1 Dok	299.996.500	1 Dok	249.995.000
67.	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	1 Unit	553.642.076	1 Unit	274.980.000

	68.	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	964 Orang	182.960.000	964 Orang	149.993.250
	69.	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	15 Orang	33.466.890	15 Orang	33.466.890
	70.	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	80 Orang	24.779.982	80 Orang	24.289.982
11.	<b>Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi</b>		<b>Persentase Akses point Sistem Informasi kesehatan yang digunakan</b>	<b>100%</b>	<b>64.304.516</b>	<b>100%</b>	<b>538.214.516</b>
	71.	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1 Dok	64.304.516	1 Dok	538.214.516
12.	<b>Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>Persentase Fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah untuk 22 Puskesmas dan 3 RSUD yang terakreditasi minimal Utama</b>	<b>80%</b>	<b>342.595.451</b>	<b>80%</b>	<b>229.891.903</b>
	72.	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	22 Unit	237.607.763	22 Unit	149.896.903

	73. Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	1 Dok	104.987.688	1 Dok	79.995.000
<b>III</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYAMANUSIA KESEHATAN</b>	<b>Persentase Puskesmas dengan 9 Jenis Tenaga Kesehatan Sesuai Standar</b>	<b>86%</b>	<b>15.304.505.151</b>	<b>86%</b>	<b>513.649.023</b>
<b>13.</b>	<b>Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Pemberian Izin Praktik Kesehatan diwilayah Kabupaten/ Kota</b>	<b>100%</b>	<b>15.251.890</b>	<b>100%</b>	<b>15.251.890</b>
	74. Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	22 Dok	15.251.890	22 Dok	15.251.890
<b>14.</b>	<b>Perencanaan Kebutuhan danPendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase pemenuhan SDM kesehatan sesuai standar</b>	<b>90%</b>	<b>14.798.703.276</b>	<b>90%</b>	<b>324.000.000</b>
	75. Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yangMemenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	500 Orang	14.798.703.276	15 Orang	324.000.000

15.	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Tenaga Kesehatan yang ber kompetensi	80%	490.549.985	80%	174.397.133
76.	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan TingkatDaerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	200 Orang	490.549.985	60 Orang	174.397.133
IV.	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Persentase apotik, Toko Obat, dan Optical yang memiliki Izin	100%	78.955.502	100%	65.315.688
		Persentase TPP (Tempat Pengolahan Pangan) yang memenuhi syarat sesuai standar	62%		62%	
16.	Pemberian Izin Apotek, TokoObat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	100%	24.000.000	100%	14.875.000

77.	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optik, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optik, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang Memenuhi Komitmen Izin	5 Sarana	24.000.000	44 Sarana	14.875.000
17.	<b>Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga</b>	<b>Persentase jumlah industri pangan yang telah memiliki ijin produksi oleh Industri Rumah Tangga</b>	<b>100%</b>	<b>27.475.000</b>	<b>100%</b>	<b>24.965.000</b>
78.	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	4 Dok	27.475.000	4 Dok	24.965.000

18.	<b>Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)</b>	<b>Persentase jumlah Industri Rumah tangga yang mempunyai Sertifikat Laik Higiene Sanitasi TPM</b>	<b>100%</b>	<b>12.500.000</b>	<b>100%</b>	<b>12.500.000</b>
79	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	2 Dok	12.500.000	2 Dok	12.500.000
19.	<b>Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga</b>	<b>Persentase jumlah IRT yang terdaftar dan telah dilakukan pemeriksaan untuk penerbitan izin edar</b>	<b>100%</b>	<b>14.980.502</b>	<b>100%</b>	<b>12.975.688</b>

	80. Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	1 unit	14.980.502	1 unit	12.975.688
<b>V</b>	<b>Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan</b>	<b>Persentase Masyarakat yang melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat</b>	<b>60%</b>	<b>326.349.775</b>	<b>60%</b>	<b>229.728.000</b>
<b>20.</b>	<b>Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Jenis penyediaan media promosi Kesehatan</b>	<b>100%</b>	<b>144.992.000</b>	<b>100%</b>	<b>99.918.000</b>
	81. Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1 Dok	144.992.000	1 Dok	99.918.000



21.	<b>Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Masyarakat yang melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat</b>	<b>60%</b>	<b>92.987.775</b>	<b>60%</b>	<b>69.930.000</b>
	82. Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	2 Dok	92.987.775	1 Dok	<b>69.930.000</b>
22.	<b>Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM</b>	<b>100%</b>	<b>88.370.000</b>	<b>100%</b>	<b>59.880.000</b>
	83. Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	4 Dok	88.370.000	2 Dok	59.880.000
<b>TOTAL PAGU</b>				<b>279.088.482.696</b>		<b>241.368.551.092</b>

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Catatan Penting**

Rencana Kerja adalah Dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu Tahun. Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2024 disusun dengan mengacu pada Rencana Pemerintahan Daerah (RPD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 – 2026 dan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 – 2026 serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024.

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 memuat program, kegiatan, Lokasi Kegiatan, Indikator Kinerja Program dan Kegiatan serta Pendanaan. Untuk Tahun 2024 Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut terdiri dari **5** (lima) Program, **22** (dua puluh dua) Kegiatan dan **78** (tujuh puluh delapan) Sub Kegiatan dengan Pagu Indikatif sebesar Rp.241.368.551.092,- *(Dua ratus empat puluh satu milyar tiga ratus enam puluh delapan juta lima ratus lima puluh satu ribu enam ratus sembilan puluh dua rupiah)*

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 selanjutnya menjadi pedoman bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2024

#### **5.2 Kaidah Pelaksanaan**

Perencanaan yang baik dan dapat dijadikan dasar pelaksanaan adalah merupakan kunci sukses pembangunan daerah, dalam artian kualitas suatu produk perencanaan dapat mendukung keberhasilan dan kelancaran pelaksanaan pembangunan daerah dengan prasyarat dokumen perencanaan ini ditaati oleh seluruh pelaku pembangunan dengan komitmen dan konsistensi yang tinggi dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan, untuk mengatasi permasalahan

yang mungkin terjadi dalam proses pelaksanaan kegiatan maka ada beberapa hal yang harus diperhatikan yakni sebagai berikut:

- a) Penyusunan Kerangka acuan disusun secara terperinci terutama terkait dengan Indikator, Target dan Jadwal pelaksanaan Kegiatan.
- b) Perencanaan kegiatan dan jadwal pelaksanaan kegiatan harus tersusun dengan baik dengan memperhatikan waktu dan Sumber Daya manusia yang ada
- c) Penyusunan anggaran kas harus memperhatikan jadwal pelaksanaan kegiatan, dan harus selaras untuk meminimalisir anggaran yang tidak terealisasi dikarenakan keterlambatan pengajuan permohonan anggaran
- d) Koordinasi baik secara internal dan eksternal perlu dioptimalkan dalam mendukung pelaksanaan kegiatan sebagai wujud pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut.

### **5.3 Rencana tindak lanjut.**

Rencana Tindak lanjut yang akan dilaksanakan untuk Peningkatan Kinerja dimasa mendatang :

1. Untuk Pencapaian target 12 (dua belas) Target SPM, Menggunakan target dari Dukcapil yang ditetapkan dengan SK Bupati
2. Meningkatkan Koordinasi Lintas sektor dan lintas program dalam peningkatan capaian SPM.
3. Perlu adanya Dukungan dan Komitmen yang tinggi dari seluruh jajaran lingkup Dinas Kesehatan serta dukungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut untuk meningkatkan Capaian Kinerja Utama (IKU) bidang Kesehatan
4. Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
5. Perlu adanya kerjasama dan MoU dengan lintas sektor terkait dalam pelaksanaan kegiatan di lapangan sehingga kegiatan bisa berjalan dengan dengan optimal

6. Kecepatan laporan KDRS ataupun W1 dari Rumah Sakit dan Fasyankes dalam memberikan informasi sehingga tindak lanjut dari dinas kesehatan bisa lebih maksimal
7. Untuk kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana akan Melakukan pembentukan TIM Cadangan kesehatan (TCK)
8. Untuk mencapai target sasaran Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut yang ditetapkan pada Tahun 2024 maka perlu di dukung dengan program dan Kegiatan, supaya program dan Kegiatan tersebut dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan maka perlu dilakukan koordinasi lintas program dan lintas sektor dalam rangka rangka sinerginis

Dengan ditetapkannya Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024, selanjutnya akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Semoga perencanaan yang telah disusun dapat terealisasi sepenuhnya dalam rangka mencapai Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan dan selaras dengan Kebijakan Daerah khususnya Pembangunan Daerah Bidang Kesehatan Kabupaten Tanah Laut secara luas dan Rencana Kerja Tahun 2024 ini dapat dijadikan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan terkait, akhirnya ucapan terimakasih disampaikan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja ini

Pelaihari, Mei 2023

Kepala Dinas Kesehatan  
Kabupaten Tanah Laut,

dr. Hj. Isna Farida, M.Kes  
NIP. 19740612 200501 2 016